

***INTERGOVERNMENTAL REVENUE, KETEPATAN SASARAN ANGGARAN,
DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)***



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Akuntansi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh :

JASMIATI
10800113026

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JASMIATI

NIM : 1800113026

Tempat / Tanggal Lahit : Balla, 13 Desember 1994

Jur/ Periode/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/ Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Samata

Judul Skripsi : *Intergovernmental Revenue, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Sitem Pelaporan Terhadap Akuntablilitas Kinerja Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kab. Enrekang).*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil kerja sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata,Gowa

2018



JASMIATI
1800113026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul ***"Intergovernmental Revenue, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Sitem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kab. Enrekang)"*** yang disusun oleh **JASMIATI**, NIM: **10800113026**, Mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2018, bertepatan dengan 29 Syawal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 13 juli 2018

29 Syawal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag.
Penguji I : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Penguji II : Drs. Thamrin Logawali, MH
Pembimbing I : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Pembimbing II : Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NIP. 19580211 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbal Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul penulis ***“Intergovernmental Revenue, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Sitem Pelaporan Terhadap Akuntablilitas Kinerja Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kab. Enrekang)”*** .hadirkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dari awal kepengurusan disemester akhir berbagai hambatan dan rintangan yang membutuhkan kesabaran dan pengorbanan bagi penulis. Namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Dengan rasa hormat, lewat penulisan saya

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama-tama penulis menyampaikan terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan, kesabaran dan hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dan tiada kata yang bisa penulis lantunkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Jaya dan Ibunda Masna yang telah menjadi kekuatan dan pahlawan bagi penulis, mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa serta rela banting tulang melawan panasnya matahari dan hujan demi membiayai buah hati mereka untuk melanjutkan pendidikan. Kalian adalah malaikat penolong kami yang sangat berharga. Terimah kasih Ayah Ibu.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

-) Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
-) Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
-) Bapak Jamaluddin M, SE,.M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus penguji 1 ujian hasil dan Munaqasyah.
-) Bapak Memen Suwandi SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi sekaligus pembimbing 1 dan Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan.

-) Ibu Nur Rahma Sari, SE.,M.Acc.,Ak sebagai pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan arahan dan nasehat kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
-) Bapak Drs. Thamrin Logawali, M.H selaku Penguji II yang memberikan arahan dalam perbaikan skripsi penulis.
-) Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
-) Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN alauddin Makassar yang selalu membantu dalam persuratan.
-) Pegawai Kantor Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang telah memberi izin dan arahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
-) Terimakasih kepada kakak saya Jasmanuddin dan Rabiah yang selalu membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam segala hal.
-) Secara khusus penulis mengucapkan terimah kepada kanda Muhammad Awaluddin S,Pd yang setia menemani selama penelitian dan kak Muriadi Akbar, S.Ak yang menjadi pembimbing ketiga bagi penulis.
-) Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 terkhusus akuntansi A, terimah kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
-) Terimah kasih kepada keluarga besar Himpunan Pelajar Massenrempulu Komisariat UIN Alauddin Makassar, dan Enrekang Akuntansi Squard yang telah mengajari arti persaudaraan walaupun tidak sedarah, persahabatan, seta menghargai orang lain, serta banyak hal lainnya.

- Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan, kesabaran, ketulusan dan do'a, penulis persembahkan skripsi ini sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Amin yarobbalalamin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangny dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan lmu pengetahuan, penulis menyadari bahwa otak manusia tidak semuanya sama ada yang cepat mencerna mata pelajaran dan ada juga yang tidak. Jadi Allah sudah mengatur takdir masing-masing dan berusaha bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat antar sesama dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Wassalamualaikum wr.wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis, 2018


JASMIATI
10800113026

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-19
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengembangan Hipotesis	6
D. Defenisi opsional dan Ruang Lingkup penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II TINJAUAN TEORETIS	20-38
A. <i>Stewardship Theory</i>	20
B. Teori Kepatuhan	22
C. <i>Intergovernmental Revenue</i>	23
D. Ketepatan Sasaran Anggaran	27
E. Sistem Pelaporan	29
F. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	30
G. Sistem Pengendalian Internal	35
H. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	40-53
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Instrument Penelitian	44
G. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54-101
A. Uji <i>Pilot Test</i>	54
B. Gambaran Umum Objek Penelitian	56

C. Hasil Penelitian	63
D. Hasil Uji Kualitas Data	73
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	76
F. Hasil Uji Hipotesis	81
G. Pembahasan	91
BAB V PENUTUP	101-105
A. Kesimpulan	101
B. Keterbatasan Penelitian	103
C. Implikasi Penelitian	104
DAFTAR PUSTAKA	106-111
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Table 1.1 : Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 : Hasil Uji Validitas <i>Pilot Test</i>	55
Tabel 4.2 : Hasil Uji Reliabelitas <i>Pilot Test</i>	56
Tabel 4.3 : Daftar Nama – Nama Bupati Enrekang	58
Table 4.4 : Data Distribusi Kuesioner	63
Table 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Table 4.6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	65
Table 4.7 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65
Table 4.8 : Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	66
Tabel 4.9 : Statistik Deskriptif Variabel	66
Tabel 4.10 : Deskripsi Pernyataan <i>Intergovernmental Revenue</i>	68
Tabel 4.11 : Deskripsi Pernyataan Ketepatan Sasaran Anggaran	69
Tabel 4.12 : Deskripsi Pernyataan Sistem Pelaporan	70
Tabel 4.13 : Deskripsi Pernyataan Akuntabilitas Kinerja Keuangan	71
Tabel 4.14 : Deskripsi Pernyataan Sistem Pengendalian Intern	72
Tabel 4.15 : Hasil Uji Validitas	74
Tabel 4.16 : Hasil Uji Realibilitas	75
Tabel 4.17 : Hasil Uji Normalitas - <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	77
Tabel 4.18 : Hasil Uji Multikoleniaritas	79
Tabel 4.19 : Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser	81
Tabel 4.20 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	82
Tabel 4.21 : Hasil Uji F – Uji Simultan	83
Tabel 4.22 : Hasil Uji T - Parsial	83
Tabel 4.23 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	88
Tabel 4.24 : Hasil Uji F – Uji Simultan	88
Tabel 4.25 : Hasil Uji T – Parsial	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 : Lambang Kabupaten Enrekang	60
Gambar 4.2 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Enrekang ..	62
Gambar 4.3 : Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram	77
Gambar 4.4 : Hasil Uji Normalitas – <i>Normal Probability Plot</i>	78
Gambar 4.5 : Hasil Heteroskedastisitas – <i>Grafik Scatterplot</i>	80



ABSTRAK

Nama : Jasmiati

Nim : 10800113026

Judul : *Intergovernmental Revenue*, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas sejauhmana pengaruh *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, dan sisem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian intern pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang sebagai variabel moderasi dalam penulisan karya Ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis linear dan analisis moderating melalui pendekatan nilai selisih mutlak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui survey kuesioner secara langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19 Dinas yang tergabung dalam SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat atau staf yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kepala sub bagian keuangan, staf akuntansi/keuangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 responden.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Sedangkan ketepatan dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Analisis variable moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi *intergovernmental revenue*, dan ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Namun sistem pengendalian internal mampu memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Kata kunci : *Intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, sistem pelaporan, sistem pengendalian internal, akuntabilitas kinerja keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Afrida (2013) mengatakan bahwa didalam “pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah.”

Sedangkan menurut *Hakim (2016)* menjelaskan bahwa :

Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang diberikan kewenangan mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang lain mempunyai pandangan yang berbeda Abdullah (2017) mengatakan bahwa Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Penelitian Andarias dalam jurnal Dewi (2015) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terjadi pada ketidakefektifan, inefisiensi dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi (*private inurement*). Hal ini disebabkan oleh mekanisme dasar pertanggungjawaban baku yang tidak dimiliki pemerintah daerah layaknya organisasi bisnis. Disisi lain penelitian yang dilakukan Pratiwy (2013) menjelaskan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi

kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Kemudian ditambahkan oleh Halim dan Ahmad (2014) bahwa Anggaran sektor publik harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Anggaran dipemerintahkan sangat penting, karena berhubungan dengan fungsi dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran Lesmana (2014). Kemudian ditambahkan oleh Nengsih (2017) yang menjelaskan bahwa anggaran harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian di dalam kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus menggambarkan sasaran kinerja secara jelas dan spesifik. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Indrayani (2017) menjelaskan perkembangan organisasi banyak mengalami *problem* yang muncul akibat kelompok-kelompok kecil yang tidak membuat organisasi semakin dinamis, melainkan malah menjadikan keruntuhan organisasi tersebut. Ini terjadi karena adanya perbedaan peran, harapan, interdependensi, dan persepsi para anggota kelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja keuangan daerah menjadi perhatian masyarakat. Berbagai macam peraturan keuangan yang diterbitkan

ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan hasil kinerja keuangan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah mulai dari adanya berbagai penyimpangan sampai pengungkapan yang tidak jelas dalam hal pengelolaan keuangan Sari Indah (2017).

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal (8/27) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

”Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Departemen Agama. 2012: 180)

Kandungan dari ayat diatas menjelaskan tentang amanat yang diberikan kepada seseorang. Dimana hal ini adalah amanat yang diberikan masyarakat kepada pemerintahan daerah dalam mengembangkan daerah tersebut. Serta pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam pengelolaan laporan keuangan. Menciptakan individu dalam organisasi menjadi jujur, adil dalam mengembangkan amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sardi (2016) menjelaskan Akuntabilitas keuangan dan kinerja mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan keuangan dan anggaran negara karena laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuat berdasarkan laporan keuangan sesuai dalam PP Nomor 8 tahun 2006. Disisi lain pandangan yang dilakukan penelitian Masdiantini (2016) bahwa untuk mewujudkan

good governance, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah maka, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan). Di samping itu, penelitian Noviandra (2016) menegaskan “pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang dicapainya”.

Pemerintah Kabupaten Enrekang membutuhkan bantuan dan kerjasama BPKP, dimana mereka melakukan sosialisasi implementasi SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah) dalam penyusunan laporan keuangan dan aset daerah bagi pimpinan SKPD lingkup Enrekang. SPIP yang diselenggarakan dipusat dan daerah harus ditingkatkan maturitasnya secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional pemerintah pusat/daerah. Bupati Enrekang menegaskan bahwa pengelolaan laporan keuangan selama ini berjalan dengan baik. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi pemberian opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Enrekang.

Di Kabupaten Enrekang sistem pengendaliannya sangat kurang sehingga Enrekang harus menerima predikat atau nilai paling terbawah di aspek pengelolaan uang rakyat, yakni *disclaimer* dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Mengenai laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diperintahkan untuk segera melengkapi kekurangan yang ada dan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD-nya. Melihat berbagai permasalahan diatas maka pemerintah wajib melakukan perbaikan kualitas manusia.

Dalam melaksanakan perbaikan tersebut maka perlu dibiayai oleh APBD. Pandangan yang dilakukan oleh Siregar (2017) mengemukakan bahwa sumber dana yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber-sumber keuangan daerah tersebut kemudian harus dialokasikan untuk pembangunan yang berhubungan dengan peningkatan manusia. Pengalokasian tersebut dibelanjakan melalui Belanja Modal.

Dalam jurnal Sugiarti (2014) menyatakan “timbulnya kecurangan di daerah salah satunya disebabkan lemahnya pengawasan”. Disamping itu pernyataan tersebut dilengkapi oleh Syarifuddin (2014) yang menjelaskan bahwa sistem pengawasan terdiri atas pengawasan internal, yaitu pengawasan oleh aparat melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga pengawasan konstitusional, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul ***“intergovernmental revenue, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi (studi empiris pada pemerintahan Kabupaten Enrekang)”***.

B. Rumusan Masalah

Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena *output* dari perencanaan

adalah penganggaran. Anggaran sektor publik harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Maka dari itu, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
2. Apakah ketepatan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi *Intergovernmental Revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
5. Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?
6. Apakah sistem pengendalian dapat memoderasi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan?

C. Pengembangan Hipotesis

1. *Intergovernmental Revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan

Menurut Simanullang (2013) menjelaskan “*Intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali atau biasa disebut

dengan dana perimbangan”. Masih dalam penelitian yang dilakukan oleh Simanullang (2013) juga menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan hasil kebijakan di bidang desentralisasi fiskal antara pusat dan daerah, misalnya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan *good governance*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2017) menjelaskan bahwa “pemerintah daerah meningkatkan kinerja dalam pertanggungjawaban keuangan karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal”. semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat akan semakin ketat.

Berdasarkan hasil pengujian yang ditemukan oleh Masdiantini (2016) bahwa variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azis (2014) yaitu dana perimbangan secara persial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Bone Bolanga, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2017) bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan artinya *intergovernmental revenue* yang semakin besar maka rasio yang dihasilkan semakin rendah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *intergovernmental revenue* atau tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dilakukan oleh Utomo (2015) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Utomo (2015) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini mendukung hasil penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah. Semakin besar proporsi *Intergovernmental Revenue* dalam suatu pemerintah daerah maka semakin buruk kinerja keuangannya. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₁: Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan

2. Ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan

Menurut Dewi Astari, (2015) “Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah dan masyarakat luas”. Hal ini berdampak pada elemen pendukung untuk akuntabilitas ketepatan sasaran anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam suatu pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat.

Kemudian hasil penelitian yang dilontarkan Dewi (2015) bahwa ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Adanya kejelasan sasaran anggaran secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin baik ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, maka semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂: Ketetapan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan

3. Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan

Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana public harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, menjelaskan bahwa laporan keuangan meliputi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Pemerintah daerah dituntut memiliki sistem akuntansi yang andal.

Jika informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah lemah, maka kualitas akuntansi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan termasuk dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian

Kusumaningrum (2010) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₃: Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

4. *Intergovernmental Revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi.

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Dalam penelitian Sesotyaningtyas (2012) *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota tersebut belum dapat menggunakan dan dari pemerintah pusat dengan baik. Terlihat dari besarnya jumlah belanja pegawai tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam melaksanakan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari

pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Hal ini, menunjukan semakin besar dana perimbangan maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi, mengidentifikasi kinerja yang buruk. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2017) bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₄ : sistem pengendalian internal memoderasi Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

5. Ketetapan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi

Penelitian yang dilakukan Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Seperti yang dijelaskan Kaltsum (Ramandei, 2013) bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern dimana sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan

mengontrol biaya sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang mengarah kepada tujuan organisasi dan meningkatkan sistem pengendalian intern. sistem pengendalian intern yang baik juga dapat mengatasi tingkat kecurangan (fraud) dari karyawan serta diharapkan sistem pengendalian intern dapat mengendalikan proses penganggaran sesuai dengan sasaran anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian Dewi (2015) menjelaskan pengendalian yang dilakukan harus efektif dan efisien agar peningkatan pencapaian kendali manajerial pada setiap bagian yang terdapat di setiap dinas dan badan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Kota Denpasar. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa semakin baik ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, maka semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₅ : sistem pengendalian internal memoderasi ketetapan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

6. Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi

Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Buruknya kinerja akuntabilitas karena banyaknya

dana yang tidak terserap dan belum lagi banyaknya PEMDA yang kemudian menyimpan dananya daripada untuk merealisasikannya bagi masyarakat.

Menurut Anjarwati (2012) Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Semakin efektif pengendalian internal dalam organisasi maka semakin efektif dan akurat sistem pelaporan yang ada pada pemerintahan. Dari uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₆: sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Independen

a. *Intergovernmental Revenue* (X₁)

Intergovernmental Revenue atau biasa dikenal dengan dana perimbangan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintah. Di samping itu, Mulyani (2017) menjelaskan bahwa dana perimbangan sesuai UU No.32/2004 dan UUNo.33/2004 terdiri dari Dana alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Maka pada penelitian ini *Intergovernmental Revenue* diukur dengan rumus sebagai berikut : Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus. Kemudian pandangan yang dilakukan oleh Mustikarini (2012) melontarkan bahwa *intergovernmental revenue* atau tingkat ketergantungan dengan

pemerintah pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiputra, dkk (2015) bahwa DAU, DAK dan DBH masing-masing mempunyai indikator diantaranya :

1. Besarnya jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat.
2. Besarnya jumlah DAK yang diberikan pemerintah pusat.
3. Besarnya jumlah DBH yang diberikan pemerintah pusat.

b. Ketepatan Sasaran Anggaran (X_2)

Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa “anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.” Menurut Samuel (Locke dan Latham 2008), menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Indikator pengukuran dalam ketepatan sasaran anggaran yaitu adanya tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi.

c. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan refleksi untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Adapun indikator yang digunakan dalam sistem pelaporan keuangan sesuai penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) sebagai berikut :

- 1) Penyebab terjadinya penyimpangan
- 2) Tindakan yang di ambil
- 3) Lamanya waktu koreksi.

d. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002) Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Adapun indikator penting yang harus di gunakan dalam mempertanggung kinerja selama kepengurusan di antaranya :

- a) Akuntabilitas kejujuran
- b) Akuntabilitas hukum
- c) Akuntabilitas Proses
- d) Akuntabilitas program
- e) Akuntabilitas Kebijakan

e. Sistem Pengendalian Intern

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. Menurut Murtanto (2005:26), terdapat lima komponen di dalam pengendalian internal, yaitu: lingkungan hidup, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentang pengaruh *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan

sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi. Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa penelitian dimana dari hasil penelitian itu berbeda-beda, untuk lebih jelasnya maka peneliti merangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

NO	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	2	3	4	5
1	Putu Riesty Masdiantini & made Adi Erawati (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran <i>intergovernmental revenue</i> , temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan	Penelitian ini terdiri 6 variabel yaitu: ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , temuan audit & opini audit. Variabel terikat ialah kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan sampling jenuh	Berdasarkan hasil pengujian ditemukan variabel kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali
2	Al Qadar Azis (2014)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan & Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	Penelitian ini terdiri 4 variabel bebas yaitu : PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Variabel terikat ialah kinerja keuangan. metode penelitian yang di gunakan ialah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Hasil dari penelitian ini bahwa dana perimbangan secara persial berpengaruh negatif & signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolanga.
3	Made Astari Pradnya Dewi dan Ni Luh Supadmi (2015)	Pengaruh ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik pada akuntabilitas kinerja skpd	Penelitian ini terdapat 3 variabel dimana variabel bebas ialah ketepatan anggaran, pengendalian manajerial. Kemudian Vvariabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja. Dan Metode yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik regresi berganda	Ketepatan anggar & pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif & signifikan pada akuntabilitas kinerja. Berarti semakin baik ketepatan anggaran & pengendalian manajerial ,semakin baik akuntabilitas kinerja PEMDA.

1	2	3	4	5
4	Ida Ayu Made Dwiki Paramit ha dan Gayatri (2016)	Pengaruh ketepatan sasaran anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik & sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja	Penelitian ini terdapat 4 variabel. variabel bebas yaitu sasaran anggaran, pengendalian manajerial, sistem pelaporan. Variabel terikat ialah akuntabilitas kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif & signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kab. Tabanan. Sistem pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif & signifikan pada akuntabilitas kinerja SKPD. Hasil penelitian juga menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD
5	Luh Febri Indarayani, Putu Gede.M dan Ari Wahyu ni (2017)	Pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas	Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel. Dimana, variabel bebas yaitu komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal. Sedangkan variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja organisasi publik	Hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan & positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif
6	Suryaningsih dan Sisdayani (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja PEMDA	Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu, karakteristik pemerintah, temuan audit. Variabel terikat yaitu, kinerja pemerintah. Dengan menggunakan metode dokumentasi	Variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan (<i>intergovernmental revenue</i>) kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja PEMDA

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
- d. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern dapat memoderasi *Intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan.
- e. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern dapat memoderasi ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
- f. Untuk mengetahui sistem pengendalian dapat memoderasi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini terfokus pada akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Kemudian ditinjau dengan menggunakan menggunakan teori *stewardship* yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Raharjo (Donaldson dan Davis, 2007) menyatakan bahwa teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-

tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Di harapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori *stewardship* dalam penerapannya yang mengarah kepada perilaku eksekutor yang lebih mementingkan tujuan organisasi dengan mengesampingkan tujuan pribadi. Juga juga diharapkan dapat mengembangkan teori kepatuhan dimana aparat pemerintah daerah Kabupaten Enrekang harus mampu mematuhi peraturan pemerintahan yang ada terutama dalam pengelolaan keuangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas untuk pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi pemerihan Kabupaten Enrekang, sehingga dapat dijadikan masukan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan yang jujur,adil dan menjalankan amanah sesuai syariat islam pada pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Stewardship Theory*

Menurut Zoelisty (2014) menjelaskan bahwa teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers* atau *principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap.

Stewardship Theory berangkat dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. Penelitian yang dilakukan Anto (2010) menjelaskan bahwa *Stewardship Theory* difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis.

Menurut Raharjo, (Donaldson dan Davis 2007) mengatakan bahwa :

“Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya”.

Teori ini banyak didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi, dimana para manajer dimotivasi untuk berbuat dan berperilaku secara kolektif untuk kepentingan organisasi. Sehingga, kerjasama seluruh anggota organisasi merupakan ciri utama dari *stewardship*. Selain itu Choirudin (Riyadi, 2017) menjelaskan “teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perbankan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya”. Menurut Natlya (2016) dengan pandangan yang berbeda mengemukakan bahwa Teori *stewardship* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal maupun organisasi.

Hubungan teori *stewardship* dengan penelitian ini dimana ada hubungan timbal balik antara aparat pemerintah dan masyarakat. Dimana kepentingan Pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang yaitu merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakatnya dan menyampingkan urusan pribadinya.

Sedangkan kepentingan pemangku kepentingan adalah kebutuhan riil akan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua kepentingan tersebut dipertermukan sehingga menjadi rumusan komitmen yang disepakati sebagai amanah dan tanggungjawab bersama dalam membangun daerah Kabupaten Enrekang.

B. Teori Kepatuhan

Yuliansyah (Sulistyo, 2017) menjelaskan bahwa teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. ini seperti perusahaan atau instansi yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena suatu kewajiban perusahaan atau instansi untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Rachmawi (2016) menjelaskan bahwa seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative-commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggung jawabannya atas keuangan dan operasional daerah tersebut selama satu tahun buku. Hal ini berarti pemerintah

mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundangundangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan defenisi diatas tentang kepatuhan maka kepatuhan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang dalam mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Pandangan yang dilakukan oleh Pamnugkas (2012) menjelaskan bahwa aparat pemerintah daerah harus menyampaikan serta mempertanggungjawabkan kegiatan Pengelolaan Keuangan berdasarkan undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan Negara maupun keuangan Daerah dan peraturan perundangan Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu uapaya pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

C. *Intergovernmental Revenue (IR)*

Menurut penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menyatakan “*Intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali”. Disisi lain Simanullang (2013) berpendapat bahwa *Intergovernmental*

revenue biasa dikenal sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Mulyani (2017) menjelaskan bahwa pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan.

Kemudian Armaja (Cahyat, 2015) mempunyai pandangan bahwa dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal.

1. Dana Alokasi Umum

Suryaningsih (2016) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dan mengurangi ketimpangan keuangan daerah yang harus ditetapkan pemerintah sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Negeri Netto. Cara perhitungan DAU atas dasar Alokasi berdasarkan jumlah gaji pegawai daerah yang bersangkutan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai Negara Sipil termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. untuk menetapkan Daerah yang mendapatkan alokasi DAK, maka pemerintah menetapkan kriteria yang meliputi kriteria umum, khusus dan teknis.

- a. *Kriteria umum* berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dari penerimaan umum APBD setelah di kurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang di perhitungkan melalui Indeks Fiskal Netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum

merupakan Indeks Fiskal Netto (Pasal 55 PP No. 78 tahun 2007 tentang dana perimbangan).

- b. *kriteria khusus* di tetapkan untuk memperhatikan perundang-undangan yang mengatur kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah yaitu, daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggi/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.
- c. *Kriteri teknis*. Untuk kriteria teknis meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan di dana dari DAK yang di rumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait yang disampaikan kepada menteri keuangan (Pasal 57 PP No. 55 Tahun 2005).

3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di bagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase yang telah di tetapkan dalam UU No.3 Tahun 2004. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sektor pajak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pasal 21. Dan DBH dari sektor alam berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan

minyak bumi, pertambangan gas umum dan pertambangan panas bumi sesuai dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

D. Ketepatan Sasaran Anggaran

Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Ketepatan sasaran anggaran pada pemerintah daerah akan memberikan implikasi terhadap kinerja aparatur daerah yang lebih baik, maka hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi.

McPhee (2008) mengemukakan bahwa "secara umum, ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai target anggaran". Disamping itu, Pangumbalerang (2014) juga mengatakan "Karakteristik anggaran salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran". Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran sesuai sasaran yang ingin dicapai organisasi tersebut. Kemudian Mulyadi (2001:489) juga melontarkan pendapat bahwa salah satu karakteristik anggaran yaitu menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisih yang dihasilkan. Kemudian pandangan yang berbeda dilakukan oleh Dewi (2015) menjelaskan bahwa pengendalian manajerial yang terdapat pada sektor publik dapat menjadi suatu alat untuk mempercepat dalam ketepatan hasil yang diinginkan pemerintah.

Dalam penelitian Paramita (2016) menjelaskan bahwa penelitian tentang kejelasan anggaran sudah banyak dilakukan, sementara penelitian tentang ketepatan sasaran anggaran masih sedikit dilakukan. Penelitian oleh Astari (2015) menemukan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Anjarwati (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kegiatan sektor publik saat ini merupakan kegiatan yang memiliki perhatian serius dalam masyarakat.

Naipospos (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam realisasinya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sedangkan Menurut penelitian Emilia (2013) dalam optimalisasi penganggaran dibutuhkan kejelasan sasaran kegunaannya. Anggaran yang tidak diketahui sasarannya akan mengakibatkan tidak sesuai kegunaan dari anggaran yang semula direncanakan. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Seperti yang di bahas di atas bahwa ketetapan sasaran anggaran belum banyak yang meneliti di bandingkan dengan kejelasan sasaran anggaran. Dapat di simpulkan bahwa ketepatan dan kejelasan sasaran anggaran saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena untuk mengetahui apakah sasaran itu tepat maka harus jelas arah dan tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Seperti yang diungkapkan Naipospos (Kenis, 2015) bahwa adanya kejelasan sasaran anggaran secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Meningkatnya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan ketepatan anggaran pendapatan dan belanja di SKPD.

E. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan refleksi untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan.

Menurut Wahyuni (2014) Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Sedangkan peneliti Suhaesti (2016) menyatakan bahwa sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Pernyataan ini diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil, dan lamanya waktu koreksi.

Peneliti Zakiyudin (2015) mengemukakan “sistem pelaporan merupakan sistem akuntansi yang dipola sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian/sub bagian dalam organisasi, maka sistem ini didesain untuk menyediakan informasi keuangan secara terpisah”. Laporan yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akhir dengan yang dianggarkan, serta mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik. Selain itu, juga menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lain, dan membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

F. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Pemerintah daerah selaku pengelola dan publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

Negara, menjelaskan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang di lampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Dalam jurnal Armaja (2015) sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa “kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendaktelah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Di samping itu Mulyani (2017) menjelaskan kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat,yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan,kepuasan pelanggan dan sebagainya.

Riawan (2016) mengatakan bahwa Kinerja keuangan daerah adalah gambaran tingkat pencapaian dari hasil kerja yang telah dilakukan dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator yang telah diatur dalam perundang-undangan selama satu periode anggaranguna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi daerahnya. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja keuangan pada unit-unit kerja pemerintah, dimana indikator *value for money* sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas program dan kegiatan.

Penelitian yang dilakukan Herawaty (2011) mengemukakan “Instansi pemerintah berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan laporannya”. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kerja yang di capainya.

Santoso (Ledvina, 2008) menyatakan “akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya”. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan tekuik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tanggungjawab seorang akuntan yang terdapat didalam Q.S Al-Zalzalah (99:7-8) yang berbunyi :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya juga. (Departemen Agama. 2012: 599).

Dalam penyusunan laporan keuangan akuntan juga dituntut untuk memiliki karakter yang baik, jujur, adil dan dapat dipercaya, seperti dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisaa (4: 135) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Departemen Agama.2012: 100).

Ayat diatas menjelaskan mengenai pentingnya sikap kejujuran dalam bertindak maupun bekerja. Sehingga sektor pemerintahan harus melaksanakan pertanggungjawaban secara politik dan tetap berpegang teguh pada syariat islam yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Zeyn (2011) bahwa aspek akuntabilitas keuangan yang paling penting dan tetap berpegang teguh pada syariat islam yang ada. Aspek akuntabilitas keuangan yang paling penting adalah apakah dana publik yang dibelanjakan sesuai dengan kesepakatan dengan dewan perwakilan atau lembaga legislatif. Salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja sangat penting dalam sebuah organisasi baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Pandangan yang kemukakan Whardana (2015) bahwa rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah salah satunya adalah Korupsi di instansi Pemerintahan. Semakin baik akuntabilitas kinerja keuangan pada sebuah organisasi maka fraud yang terjadi dapat diminimalisir selain itu sistem pengendalian internal pemerintahan harus lebih baik.

G. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Afrida (2013) dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 mengemukakan bahwa :

“Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Hakim (2016) mengatakan bahwa Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penelitian yang dilakukan Indrayani (Treshawati, 2017) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pada dinas pendapatan daerah kota Bandung. Hal ini menunjukkan pengendalian yang dilakukan secara efektif akan mempengaruhi kinerja yang lebih baik dari pemerintah.

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Afrida, 2013). Sedangkan Aldina (2016) menjelaskan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Aren (2008) mengatakan bahwa ada beberapa komponen dalam Pengendalian Internal pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Lingkungan Pengendalian. Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.
- b) Penilaian Risiko. Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

- c) Aktivitas Pengendalian, Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan.

Penelitian Tresnawati (2011) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di dinas pendapatan daerah. Penelitian Yosefrinaldi (2011) menyimpulkan bahwa kepastian sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah.

Sebagai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahan:

“Wahai orag-orang yang briman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah disini sebagai pembuat kebijakan dan peraturan. Maka semua intansi terutama pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Enrekang harus patuh terhadap aturan dan kebijakan dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

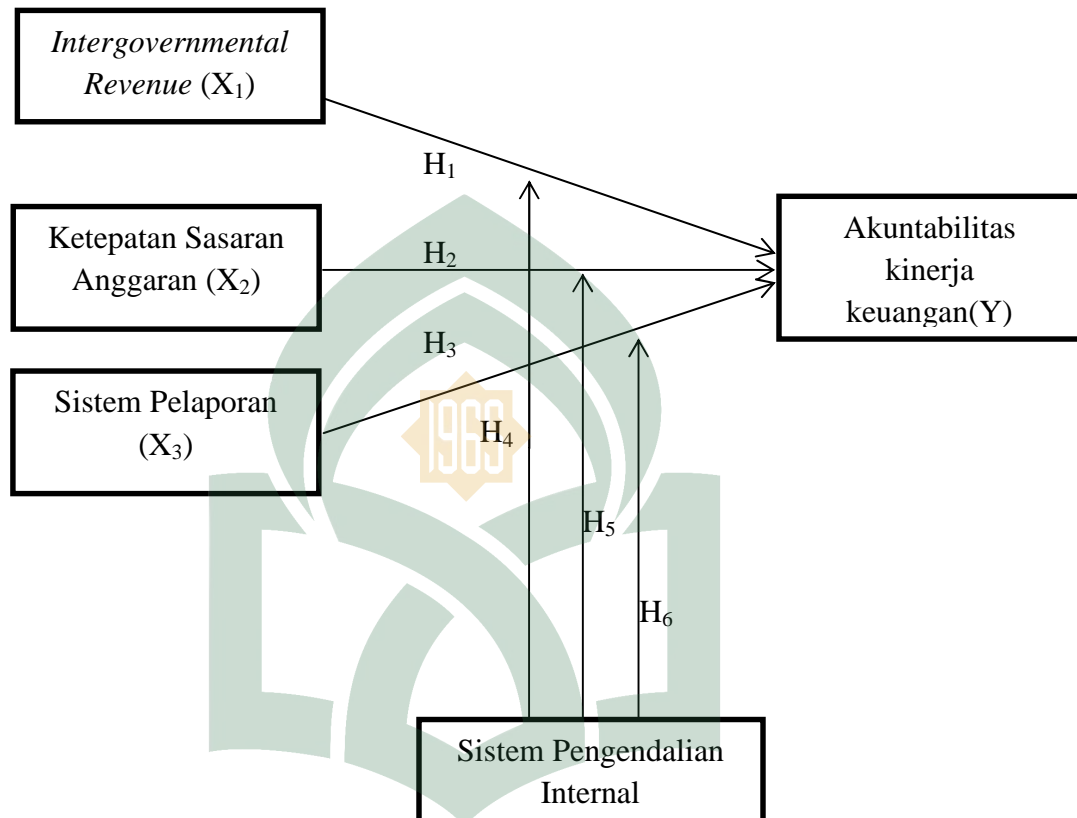
berlaku di Indonesia. Dan jika dalam suatu organisasi berbeda pendapat maka harus diselesaikan secara bermusyawarah.

Syarifuddin (2014) sesuai Permendagri No. 4 Tahun 2008 mengemukakan bahwa bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan mengetahui *Intergovernmental Revenue* (X_1), *Ketetapan Sasaran Anggaran* (X_2), dan *Sistem Pelaporan* (x_3) apakah berpengaruh terhadap *Akuntabilitas Kinerja Keuangan* (Y) dengan *Sistem Pengendalian Internal* sebagai variabel Pemoderasi yang akan memperkuat atau memperlemah variabel Independen. Adapun Kerangka Pikir dalam penelitian ini menunjukkan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis dan digambarkan dalam skema dibawah ini :

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (Angka). Dalam penelitian kuantitatif data yang akan didapat jelas dan dirinci dengan baik sesuai dengan kenyataannya artinya kebenarannya sudah diuji. Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif. Menurut Yosefrinaldi (Sugiyon, 2013) “Penelitian kuantitatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara variabel dan mengetahui seberapa jauh variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen”. Dalam hal ini melihat seberapa besar pengaruh *intergovernmental revenue*, ketetapan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan melalui sistem pengendalian internal.

2. Lokasi penelitian

Penelitian yang saya lakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pandangan yang ungkapkan oleh Indrayanto dan Supomo

(2013) bahwa “Pendekatan deskriptif adalah yang menggambarkan masalah-masalah berupa fakta-fakta dari suatu populasi”. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau jawaban pernyataan yang diajukan kepada subyek penelitian. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian atau prosedur

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang saya angkat dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Enrekang yang terdiri dari dinas-dinas, kantor dan badan. Terdapat 20 dinas, 12 kantor, dan 6 badan. Dengan metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. *purposive sampling* atau metode untuk menentukan sampel dengan kriteria tertentu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili dari populasi penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sampel ditentukan dengan pertimbangan ataupun dengan kriteria tertentu.

Adapun kriteria dalam pengambilan sampel penelitian yaitu :

- a. Dinas – dinas yang terdaftar dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Dimana terdapat 20 dinas diantaranya yaitu :

- 1) Dinas Sosial

- 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pertanian
 - 4) Dinas Perhubungan
 - 5) Dinas Pekerjaan umum
 - 6) Dinas lingkungan hidup
 - 7) Dinas Ketahanan Pangan
 - 8) Dinas Peternakan dan perikanan
 - 9) Dinas pendidikan dan kebudayaan
 - 10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 11) Dinas Perindustrian dan perdagangan
 - 12) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
 - 14) Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
 - 15) Dinas Koperasi, UKM, tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 16) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 17) Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Penata Ruang
 - 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 19) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 20) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Sampel yang diambil 75 responden yang berkaitan dengan proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat atau staf yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan,

pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kepala sub bagian keuangan, kebendaharaan dan staf akuntansi/keuangan.

Pemilihan dinas ini dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan dan melaporkan keuangan atau sebagai pelaksanaan keuangan dari pemerintah daerah yang cakupan kerjanya lebih luas daripada badan dan lembaga teknis dinas serta merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga dianggap mampu mewakili untuk menggambarkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari setiap SKPD. Dan menggambarkan ketepatan sasaran anggaran, pelaporan yang akurat serta pertanggungjawabannya dalam setiap kinerja yang dilaksanakan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. Dalam penelitian yang dilakukan Indriantoro dan Supomo (2013) menjelaskan bahwa “data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa sikap, opini, pengalaman atau perilaku dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden)”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pernyataan yang diberikan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengungkapkan fakta yang diperoleh dari jawaban responden berupa kuesioner berbentuk daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya. Kuesioner tersebut sudah disediakan pilihan jawaban dalam setiap kolom sehingga responden tinggal mengisi sesuai petunjuk yang berikan. Kuesioner merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dalam laporan anggaran atas kinerja tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahuinya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sebenarnya dengan mendatangi tempat responden (pegawai) di SKPD Kabupaten Enrekang. Dan pengambilan kuesioner diambil secara langsung oleh peneliti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang berupa pedoman observasi, di uji coba terlebih dahulu untuk mengamati perilaku subjek sampel yang komparabel dan prosedur yang tersandar sebelum digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang sesungguhnya instrumen yang di pakai dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner). Kuesioner ini berisi draf pertanyaan dan responden diminta memilih salah satu jawaban yang tersedia. Kuesioner atau angket mengacu pada variabel bebas (*Intergovernmental Revenue* atau Dana Perimbangan, Ketepatan Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pelaporan) dan variabel yang terikat (Akuntabilitas

Kinerja Keuangan) yang menggunakan skala sikap model likert. Skala yang digunakan terdiri dari 5 rincian yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

Sedangkan kuesioner atau angket mengacu pada variabel moderasi (Sistem Pengendalian Intern) yang menggunakan skala dikotomi dengan jawaban : Tidak = 0 dan Ya = 1

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang merupakan suatu analisa yang diperoleh dari pernyataan dan sudah diolah dalam benyuk angka-angka sedangkan pembahasannya dengan melalui perhitungan statistik. Tahap pertama yaitu sesudah responden mengisi kuesioner yang di bagikan maka di lakukan berbagai proses sebelum data di olah dalam statistik. Kemudian pemberian nilai atau skor dalam penelitian ini dengan menggunakan skala *likert*, yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Skala ini digunakan untuk melihat seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang di ajukan dalam skala 5 poin, yaitu : Nilai 1 = Sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = setuju (S), 5 = sangat setuju (SS). Tahap selanjutnya setelah kuesioner tersebut atau data yang di peroleh dan siap untuk diolah dalam statistik. Data diolah dengan bantuan program SPSS 21.0.

Pada penelitian ini menggunakan uji *pilot test* dengan menguji validitas dan reliabiitas pada kuesioner yang akan dibagikan ke responden asli yaitu pegawai

SKPD kabupaten Enrekang. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil sampel kecil sebanyak 35 responden yang dibagikan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Jika suatu item pernyataan tidak lolos pengujian ini maka, item tersebut dihapus atau diperbaiki struktur dan maksud kalimatnya. *Pilot test* ini dilakukan sampai semua indikator lolos pengujian validitas dan reliabilitas. Setelah lolos maka pernyataan dari setiap indikator dapat di bagikan langsung ke responden asli. Dimana $N=35-2=33$ adalah 0,282. Pada pengujian pilot test semua variabel diatas r tabel yaitu $> 0,282$ dengan tingkat sig. $<$ dari 0,05. Maka semuanya dikatan valid. Begitupn dengan uji reliabilitas semuanya $> 0,60$ sehingga pernyataan tersebut dikatan andal dan adapt dilanjutkan

1. Analisis Data Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari penelitian tersebut. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai usia, latar belakang pendidikan, masa kerja, jenis kelamin dan data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Sekaran (2011) Uji validasi adalah “suatu taraf dimana alat pengukur dapat mengukur apa-apa yang seharusnya di ukur serta menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur”.

Kuesioner merupakan salah satu alat yang di gunakan dalam pengumpulan data sebagai instrumen penting yang harus di lakukan pengujian terlebih dahulu. Uji validasi di lakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing – masing variabel. Pengujian validitas menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Nilai r hitung lebih dari () r tabel maka instrumen atau kuesioner yang di gunakan di nyatakan valid dan sebaliknya.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Reliability atau keandalan menguji seberapa konsisten suatu instrumen pengukuran mengukur apa pun konsep yang diukurnya (Sekaran, 2011:39). Suatu variabel dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik pengujian reabilitas ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha*, hasil perhitungan menunjukkan reliabel bila koefisien alphanya (α) lebih besar dari 0,600 artinya kuesioner dapat di percaya dan dapat di gunakan untuk penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bias langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi harus di uji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik yang mencakup hal sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik.

Menurut Ghazali (2013) analisis grafik dapat dilakukan dengan :

- a) Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan
- b) *Normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Cara lain adalah dengan *one-simple Kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari *one-simple Kolmogorov-smirnov* sesuai penelitian yang dilakukan Ghazali (2013) adalah :

- 1) Jika hasil *one-simple Kolmogorov-smirnov* di atas tingkat signifikan 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika hasil *one-simple Kolmogorov-smirnov* dibawah tingkat signifikan 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Ghazali (2013) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk apakah model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen sama atau nol. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) Nilai tolerance dan (2) Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas (*independent variable*) terjadi persoalan multikolinearitas dan sebaliknya bila VIF kurang dari 10, maka antar variabel bebas (*independent variable*) tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang lebih baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data cross section mengandung berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Menurut pandangan yang dilakukan oleh Ghozali (2013) Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode grafik yaitu dengan grafik Scatterplot. Apabila dari grafik tersebut menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Model yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variable independen terhadap variable dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variable bebas terhadap satu variable tergantung, baik secara persial maupun simultan.

Rumus untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable dependen yaitu : $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan

β_0 = konstanta

X_1 = *intergovernmental revenue*

X_2 = Ketepatan Sasaran Anggaran

X_3 = Sistem Pelaporan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi berganda

e = *error term*

b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Menurut Ghazali (Frucot dan Shaeron, 2013) menyatakan bahwa model regresi ini agak berbeda dalam menguji pengaruh moderasi dengan model nilai selisih mutlak dari variable independen. Masih dalam penelitian yang dilakukan Ghazali (2013) mengungkapkan bahwa interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X_1 dan X_2

berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variable *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran dan system pelaporan berasosiasi dengan skor rendah system pengendalian internal (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel *intergovemental revenue*, ketepatan sasaran anggaran dan system pelaporan berasosiasi dengan skor tinggi dari system pengendalian internal (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \quad + 1ZX1 + 2ZX2 + 3ZX3 + 4ZM + 5|ZX1-ZM| + 6|ZX2-ZM| + 7|ZX3-ZM| + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan

ZX1 = Standardize *intergovemental revenue*

ZX2 = Standardize ketepatan sasaran anggaran

ZX3 = Standardize Sistem Pelaporan

ZM = Standardize Sistem Pengendalian Internal

$|ZX1-ZM|$ = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara ZX1 dan ZM

$|ZX2-ZM|$ = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara ZX2 dan ZM

$|ZX2-ZM|$ = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara ZX2 dan ZM

a = konstan

b = koefisien regresi

e = *error term*

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial (t-test) :

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2) Uji Regresi secara simultan

Uji F dilakukan dengan menguji pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat :

- a. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel yaitu : pertama jika t hitung $>$ dari t table maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kemudian yang kedua jika t

hitung $<$ dari t table maka hipotesis ditolak. Artinya independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variable dependen secara signifikan.

b. Melihat *Probabilities Value*

Ini dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitas dengan 0,05 yaitu jika probabilitas $>$ 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak. Dan jika probabilitas $<$ 0,05 maka hipotesis tersebut diterima.

3) Uji Regresi Parsial

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variable dependen. Uji statistik t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dapat dilihat dengan membandingkan t hitung dengan t table yaitu : Jika t hitung $>$ t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

Selain itu juga dapat dilihat dengan *Probabilities Value* yaitu: jika probabilitas $>$ 0,05 maka hipotesis tersebut ditolak, sebaliknya Jika probabilitas $<$ 0,05 maka hipotesis tersebut diterima, dan jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Pilot Test

Sebelum melakukan penelitian langsung ke responden asli. Maka peneliti melakukan uji *pilot test* (uji coba kuesioner) pada semua variabel karena ada salah satu variabel yang sebelumnya tidak menggunakan kuesioner, dan hanya menggunakan data sekunder saja. Maka dari itu, peneliti melakukan *pilot test* dengan menguji validitas dan reliabilitas pada kuesioner yang akan dibagikan ke responden asli yaitu pegawai SKPD kabupaten Enrekang. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil sampel kecil sebanyak 35 responden yang dibagikan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa semua pernyataan pada variabel tersebut Valid. Dimana, r hitung lebih besar daripada r tabel yaitu 0,282 dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini dapat didukung oleh penelitian Pamungkas (2012) menjelaskan jika r hitung $>$ r tabel berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya, bila r hitung $<$ r tabel berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid). Dan tidak diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Setelah ditentukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan adalah valid, kemudian mengadakan uji reliabilitas. Adapun hasil pengujian yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil uji validitas

variabel	item	r hitung	r tabel	keterangan
Intergovernmental revenue	IR1	0,908	0,282	valid
	IR2	0,835	0,282	valid
	IR3	0,868	0,282	valid
ketepatan sasaran anggaran	Ks1	0,438	0,282	valid
	KS2	0,469	0,282	valid
	Ks3	0,505	0,282	valid
	Ks4	0,627	0,282	valid
	Ks5	0,612	0,282	valid
	Ks6	0,432	0,282	valid
	Ks7	0,792	0,282	valid
	Ks8	0,786	0,282	valid
	Ks9	0,686	0,282	valid
	Ks10	0,711	0,282	valid
	Ks11	0,411	0,282	valid
	Ks12	0,693	0,282	valid
Sistem Pelaporan	SP1	0,9	0,282	Valid
	SP2	0,895	0,282	Valid
	SP3	0,874	0,282	Valid
akuntabilitas	AK1	0,632	0,282	Valid
	Ak2	0,75	0,282	Valid
	AK3	0,685	0,282	Valid
	AK4	0,611	0,282	Valid
	AK5	0,668	0,282	Valid
	AK6	0,598	0,282	Valid
Sistem Pengendalian internal	SPI1	0,537	0,282	Valid
	SPI2	0,653	0,282	Valid
	SPI3	0,731	0,282	Valid
	SPI4	0,693	0,282	Valid
	SPI5	0,709	0,282	Valid
	SPI6	0,712	0,282	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)

Tabel 4.2
Hasil uji reliabilitas

NO	variabel	Cronbac'h Alpha	Keterangan
1	Intergovernmental revenue	0,838	Reliabel
2	ketepatan sasaran anggaran	0,844	Reliabel
3	Sistem Pelaporan	0,864	Reliabel
4	Akuntabilitas	0,733	Reliabel
5	Sistem Pengendalian internal	0,753	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.2 bahwa instrument penelitian tersebut dapat dipercaya dan handal. Yang menunjukkan bahwa koefisien *Cronbac'h Alpha* lebih besar dari 0,600. Sehingga Item atau pernyataan tersebut dinyatakan valid dan reliabilitas. Kemudian dapat digunakan untuk pengujian data lebih lanjut ke responden aslinya yaitu pegawai pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2012) bahwa Instrumen atau pernyataan dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika koefisien *cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,600 dan sebaliknya jika *cronbach's Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka instrument tersebut tidak andal/reliabel.

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang artinya daerah pinggiran gunung atau menyusur gunung. Enrekang berasal dari sebutan ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa ENREKANG berasal dari bahasa Bugis yang berarti daerah pengunungan.

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang – Undang NIT No. 44 Tahun 1960, Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi (*AFDELING*) Pare-Pare yang lebih dikenal dengan nama kabupaten Pare-Pare lama dimana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah diantara 5 (lima) Kewedanaan lainnya. Keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Sidenreng Rappang, Barru, Pinrang, dan Pare-Pare. Kelima gabungan daerah tersebut dari dulu dikenal dengan nama : AFDELING PAREPARE.

Terbentuknya DASWATI II ENREKANG atau Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. Maka, sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 februari 1960 dilantiklah saudara H. ANDI BABBA MANGOPO sebagai Bupati yang pertama di Kabupaten Enrekang. Perda Nomor : 4,5,6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan 2 Kecamatan sehingga pada saat ini enrekang telah memiliki 11 (sebelas) Kecamatan yang definitif yaitu :

- a) Kecamatan Enrekang ibukotanya Enrekang
- b) Kecamatan Maiwa ibukotanya Maroangin
- c) Kecamatan Anggeraja ibukotanya Cakke
- d) Kecamatan Baraka ibukotanya Baraka
- e) Kecamatan Alla ibukotanya Belajen

- f) Kecamatan Curio ibukotanya Curio
- g) Kecamatan Bungin ibukotanya Bungin
- h) Kecamatan Malua ibukotanya Malua
- i) Kecamatan Cendana ibukotanya Cendana
- j) Kecamatan Buntu Batu ibukotanya Pasui
- k) Kecamatan Masalle ibukotanya Lo'ko hasil pemekaran dari Kecamatan Alla.

Hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka diresmikan oleh Bapak Bupati Enrekang yang dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2007. Dari 11 (sebelas) Kecamatan defenitif terdapat 112 (seratus dua belas) desa / kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 desa.

Tabel 4.3
Bupati Enrekang tahun 1960 sampai sekarang

NO	Nama Bupati	Periode
1	Andi Babba Mangopo	1960 – 1963
2	Muhammad Nur	1963 – 1964
3	Muhammad Cahtif Lasiny	1964 – 1965
4	Bambang Soetresna	1965 – 1969
5	Abdullah Rachman, B.A	1969 – 1971
6	Drs. Mappatoeroen Parawansa	1971 – 1973
7	Mochammad Daud	1973 – 1978
8	H. aAbdoellah Dollar, B.A	1978 – 1983
9	Muhammad Saleh Nurdin Agung	1983 – 1988
10	Meyjend. TNI H. M. Amin Syam	1988 – 1993
11	Andi Rachman	1993 – 1998
12	Drs. Andi Iqbal Mustafa	1998 – 2003
13	Ir. H. La Tinro a Tunrung	2003 – 2008
14	H. Muhammad Lody Sindangan, S.H, M.Si	2008, Pelaksana Tugas
15	Ir. La Tonro La Tunrung	2008 – 2013
16	Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd	2013– sekarang

2. Letah Wilayah dan Geografis

Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian ± 3.000 meter diatas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur. Sedangkan sebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan dengan pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang terletak antara $3^{\circ} 14'36''$ sampai $03^{\circ} 50' 00''$ LS dan $119^{\circ}40'53''$ sampai $120^{\circ} 06' 33''$ BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang, sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang, sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Penduduknya sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada Sektor Pertanian ($\pm 65\%$).

3. Logo Kabupaten Enrekang



a. Lambang

Lambang Kabupaten Enrekang berbentuk perisai dengan dasar ungu bergaris pinggir hitam dan didalamnya terdapat lukisan (keterangan gambar Lambang Massenrempulu) :

- 1) Dibagian atas bintang sudut lima berwarna kuning diatas satu bidang segi lima dasar hitam
- 2) Dibawah kris dan kelewang terhunus bersilang keatas, berwarna merah tua.
- 3) Ditengah-tengah dua gunung kehijau-hijauan, perkebunan, persawahan dan sungai.
- 4) Dibawah lima cincin berantai yaitu dua ungu, satu hijau dan satu yang memperhubungkan antara padi (kiri) dan kopi (kanan) yang asing-masing melengkung keatas.
- 5) Di bagian bawah pita hitam dasarnya dengan tulisan putih MASSENREMPULU.

b. Arti Lambang

- 1) Perisai dasar warna ungu melambangkan adalah diambil dari gelaran Manurung Enrekang "LAKAMUMMU" yang berarti ungu karena Enrekanglah mendapat kehormatan sebagai Ibu Kota dari lima Kerajaan.

Kerajaan kecil federasi tadi (sekarang ibukota Kabupaten Enrekang) dari ibukota inilah mencerminkan keseluruhan MASSENREMPULU.

- 2) Lima Cincin Berantai melambangkan sejarah Pemerintahan MASSENREMPULU Panca Tunggal, dulu lima Swapraja dan lima kecamatan induk.
- 3) Warna-warna cincin melambangkan sejarah bahasa daerah MASSENREMPULU yaitu tiga kecamatan bahasa Duri, satu bahasa Enrekang dan satu bahasa Maiwa. Bahasa mana karena memang dari satu rumpun, bias dimengerti oleh seluruh rakyat di wilayah ini.
- 4) Warna hitam yang terdapat pada lukisan ini melambangkan bahwa warganya adalah sederhana di segala bidang.
- 5) Kris dan Klewang melambangkan pusaka nenek moyang yang dianugerahkan Yang Maha Kuasa pada ke lima kerajaan. Kerajaan tadi dan digelar "MANURUNG". (tiap-tiap kerajaan tadi mempunyai gelaran tersendiri-sendiri), juga menggambarkan kepahlawanan warganya sejak dulu kala dan menjadi pusaka turun temurun.

4. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

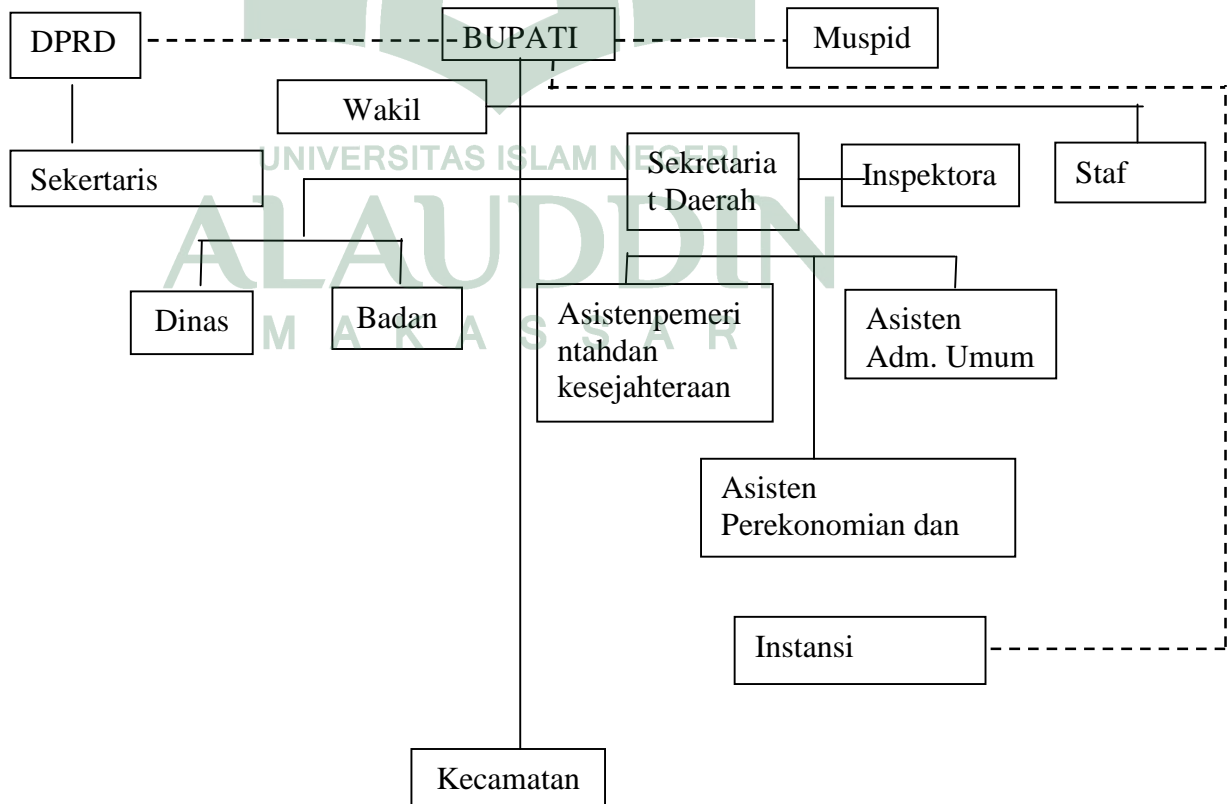
Visi pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 adalah “terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju daerah agropolitan berwawasan lingkungan”. Pernyataan ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik :
- b) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum (Jalan, Jembatan, Sanitasi, Air Bersih, Irigasi/Sumber Air Pertanian, Listrik dan Telekomunikasi).
- c) Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi, yaitu peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.
- d) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-Laki/Perempuan.
- e) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri.
- f) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.

5. Struktur Pemerintah Kabupaten Enrekang

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerinta Kab. Enrekang



Keterangan :

———— = Garis Komando

----- = Garis Koordinasi/Pembinaan

Pada penelitian ini data yang di peroleh dan data yang dapat diolah hanya dari 19 SKPD. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya, keterbatasan waktu, masalah perizinan, serta responden yang sibuk karna melakukan perjalanan dinas luar kota maupun mengikuti diklat.

C. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 80 dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang disebarkan	80	100 %
2	Kuesioner yang tidak kembali	3	4 %
3	Kuesioner yang kembali	77	96 %
4	Kuesioner yang cacat	2	2,5 %
5	Kuesioner yang dapat diolah	75	94 %
n sampel = 75 Respdn Rate = $(75/80) \times 100\% = 94\%$			

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 80 butir dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 77 dan yang dapat diolah yaitu sebanyak 75 butir atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 94% dari total yang disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 3 butir atau tingkat yang diperoleh sebesar 4%. Dari 4 kuesioner yang tidak kembali disebabkan

karena pegawai instansi pemerintah daerah yang membawa pulang kuesioner tersebut namun tidak membawanya kembali. Sedangkan kuesioner yang tidak lengkap atau tidak dapat diolah sebesar 2,5% dikarenakan kuesioner tidak diisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan serta data tidak lengkap sehingga dinyatakan cacat dan tidak layak untuk diolah.

Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	20	26 %
2	Perempuan	55	74 %
	Jumlah	75	100 %

Sumber : Data primer yang diolah 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 55 orang dengan 74% dan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki 20 orang senilai 26%. Hal ini juga menunjukkan bahwa SKPD di Kab. Enrekang didominasi oleh pegawai perempuan. Meskipun begitu adanya kebijakan pemerintah dalam hal persamaan *gender* atau emansipasi, dimana hak bekerja pada perempuan dengan laki-laki adalah sama.

b. Usia

Tabel 4.6
Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30 Tahun	12	16 %
2	31-40 Tahun	26	35 %
3	41-50 Tahun	31	41 %
4	>50 tahun	6	8 %
Jumlah		75	100 %

Sumber : data primer yang diolah (2018)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang paling tinggi adalah yang berumur 41-50 tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 41%. Sisanya jumlah responden berumur 31-40 tahun sebanyak 26 orang dengan persentase 35%. Umur yang paling muda antara 20-30 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 16% dan umur yang paling tua yaitu diatas 50 tahun sebanyak 6 orang dengan tingkat persentase 8%.

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.7
Karakteristik responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D3	10	14 %
2	S1	59	78 %
3	S2	6	8 %
4	S3	0	0 %
Jumlah		75	100 %

Sumber : data primer yang diolah (2018)

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pendidikan terakhir adalah S1 yang paling banyak sejumlah 59 orang dengan tingkat persentase yang dimiliki sebesar 78%, pendidikan terakhir D3 sebanyak 10 orang senilai 14%, dan pendidikan terakhir S2 sebanyak 6 orang dengan persentase 8%. Sementara tidak ada responden yang berpendidikan terakhir S3 pada dinas-dinas di Kab. Enrekang.

d. Masa Kerja

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	0-5 Tahun	35	46 %
2	6-10 Tahun	21	28 %
3	>10 Tahun	19	26 %
Jumlah		75	100 %

Sumber : data primer yang diolah (2018)

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan masa kerja 0-5 tahun memiliki jumlah yang paling tinggi sebanyak 35 orang dengan tingkat persentase 46%. Sisanya, dengan jumlah responden pada masa kerja 6-10 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 28%. Dan masa kerja responden yang sudah lama bekerja yakni lebih dari 10 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 26%.

2. Analisis Deskriptif Variabel

a. Analisis Deskriptif Variabel

Deskripsi variabel dari 75 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Intergovernmental Reve-nue</i>	75	7,00	15,00	12,0400	1,56343
Ketepatan Sasaran Ang-garan	75	36,00	58,00	49,8933	4,20287
Sistem Pelaporan	75	9,00	15,00	13,5867	1,45280
Sistem Pengendalian Internal	75	16,00	30,00	22,2267	2,76353
Akuntabilitas Kinerja Keuangan	75	18,00	28,00	24,4267	1,98081
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 15, mean (rata-rata) sebesar 12,04 dengan standar deviasi sebesar 1,56. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel ketepatan sasaran anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 36, nilai maksimum sebesar 58, mean (rata-rata) sebesar 49,89 dengan standar deviasi sebesar 4,20. Selanjutnya hasil analisis terhadap variabel sistem pelaporan menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 15, mean (rata-rata) 13,58 dengan standar deviasi sebesar 1,45. Variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 22,22 dengan standar deviasi sebesar 2,76. Sedangkan variabel akuntabilitas kinerja keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 28, mean (rata-rata) sebesar 24,42 dengan standar deviasi sebesar 1,98.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel ketepatan sasaran anggaran yakni 49,89 sedangkan nilai terendah adalah variabel *intergovernmental revenue* sebesar 12,04. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel ketepatan sasaran anggaran sebesar 4,20 dan yang terendah variabel *intergovernmental revenue* sebesar 1,56.

b. Analisis Deskriptif Pernyataan

1) Analisis Deskriptif Variabel *intergovernmental Revenue* (X_1)

Analisis deskriptif variabel *intergovernmental revenue* terdiri dari 3 item pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai *intergovernmental revenue*.

Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.10
Deskripsi Item Pernyataan Variabel *intergovernmental Revenue*

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
IR1	1		10	47	17	304	4,05
IR2			11	48	16	305	4,07
IR3		1	12	54	8	294	3,92
Rata-rata Keseluruhan							4,01

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 75 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada *Intergovernmental Revenue* (X_1) berada pada skor 4,01. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap *Intergovernmental Revenue* pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Pada penggunaan dana perimbangan terlihat bahwa nilai indeks tertinggi pada SKPD yaitu sebesar 4,07 yang terdapat pada item kedua. Dimana, dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan program yang dijalankan. Sementara indeks terendah sebesar 3,92 terdapat pada item ketiga artinya dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan program yang dijalankan.

2) Analisis Deskriptif Variabel Ketepatan Sasaran Anggaran (X_2)

Analisis deskriptif variabel ketepatan sasaran anggaran terdiri dari 12 item pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.11
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Ketepatan Sasaran Anggaran

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	ST S	TS	R	S	SS		
KS1			8	47	20	312	4,16
KS2			10	48	17	307	4,09
KS3			27	43	5	278	3,71
KS4			22	42	11	289	3,85
KS5		1	8	49	17	307	4,09
KS6		1	9	54	11	300	4,00
KS7			4	32	39	335	4,47
KS8			3	41	31	328	4,37
KS9			5	41	29	324	4,32
KS10			12	31	32	320	4,27
KS11			6	49	20	314	4,19
KS12			4	39	32	328	4,37
Rata-rata Keseluruhan							4,16

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa dari 75 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap 12 item-item pernyataan pada ketepatan sasaran anggaran (X_2) berada pada daerah skor 4,16. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap ketepatan sasaran anggaran pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Pada variabel ketepatan sasaran anggaran, terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 4,47 terdapat pada item ketujuh, dimana pegawai SKPD di Kabupaten Enrekang menganggap bahwa ketidakjelasan

sasaran anggaran perlu dihindari dalam penentuan rencana anggaran dimasing-masing unit. Sedangkan indeks terendah sebesar 3,71 terdapat pada item ketiga. Dimana, pegawai SKPD mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program yang akan dilaksanakan.

3) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan (X_3)

Analisis deskriptif variabel ketepatan sasaran anggaran terdiri dari 3 item pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.12
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pelaporan

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
SP1			5	33	37	332	4,43
SP2			3	29	43	340	4,53
SP3			1	26	48	347	4,63
Rata-rata Keseluruhan							4,53

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas secara umum persepsi responden terhadap 3 item-item pernyataan sistem pelaporan (X_3) dengan skor 4,53. Berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap sistem pelaporan pada pemerintahan Kab. Enrekang. Pada variabel sistem pelaporan terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 4,63 yang terdapat pada item ketiga bahwa pegawai SKPD Kab. Enrekang yang menunjukkan kejelasan dalam pencatatan penggunaan anggaran harus jelas dan terperinci. Sementara indeks terendah sebesar 4,43 terdapat di item pertama bahwa

adanya pembuatan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran kas yang harus dibuat secara amanah dan dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

4) Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y)

Analisis deskriptif variabel akuntabilitas kinerja keuangan terdiri dari 6 item pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.13
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
AK1			12	52	11	299	3,99
AK2		1	9	51	14	303	4,04
AK3			9	58	8	299	3,99
AK4		1	18	50	6	286	3,81
AK5			4	43	28	324	4,32
AK6			6	42	27	321	4,28
Rata-rata Keseluruhan							4,07

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.13 terhadap 6 item-item pernyataan pada akuntabilitas kinerja keuangan (Y) berada pada skor 4,07. Berarti responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Pada variabel akuntabilitas kinerja keuangan terlihat bahwa indeks tertinggi sebesar 4,32 yang terdapat pada item ke-5 artinya aparat Pemerintahan Kab. Enrekang harus mempertanggungjawabkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan indeks terendah sebesar 3,81 pada item keempat yang menunjukkan bahwa kurangnya insentif berupa pengakuan positif, yang tidak

menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan organisasi.

5) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (M)

Analisis deskriptif variabel Sistem Pengendalian Internal terdiri dari item pernyataan akan dilakukan dari hasil responden mengenai ketepatan sasaran anggaran. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.14
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pengendalian Internal

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
SPI1	2	2	37	33	1	254	3,39
SPI2			38	29	8	270	3,60
SPI3		2	22	43	8	282	3,76
SPI4			23	48	4	281	3,75
SPI5		1	17	48	9	290	3,87
SPI6			24	37	14	290	3,87
Rata-rata Keseluruhan							3,71

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 75 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap 6 item-item pernyataan pada sistem pengendalian internal berada pada yang cukup tinggi dengan skor 3,71. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap sistem pengendalian internal pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Pada variabel sistem pengendalian internal, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,87 yang terdapat pada item kelima dan keenam. Hal ini berarti bahwa penetapan target anggaran, rencana jangka pendek dan jangka di Kabupaten Enrekang digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan. Sementara indeks terendah sebesar 3,39 pada item pertama menunjukkan bahwa pengendalian kualitas seperti tabulasi data, pengolahan data atau teknik statistik lainnya digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang.

D. Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari pengguna instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variable penelitian valid atau tidak. Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid yaitu mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi berbagai total yang diperoleh harus harus dibandingkan dengan angka dalam tabel *r product moment*. Apabila nilai *r* hitung lebih besar atau sama dengan *r* tabel kuesioner maka, kuesioner tersebut dikatakan valid dan sebaliknya. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 75 responden dan besarnya df dapat dihitung $75-2= 73$, dengan $df = 73$ dan $\alpha = 0,05$ di dapat *r* tabel = 0,227. Jadi, item pertanyaan yang valid harus mempunyai *t* hitung lebih besar dari 0,227.

Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
<i>Intergovernmental Revenue</i>	IG1	0,88	0,227	Valid
	IG2	0,89	0,227	Valid
	IG3	0,74	0,227	Valid
Ketepatan Sasaran Anggaran	KS1	0,538	0,227	Valid
	KS2	0,64	0,227	Valid
	KS3	0,638	0,227	Valid
	KS4	0,552	0,227	Valid
	KS5	0,684	0,227	Valid
	KS6	0,576	0,227	Valid
	KS7	0,465	0,227	Valid
	KS8	0,57	0,227	Valid
	KS9	0,634	0,227	Valid
	KS10	0,552	0,227	Valid
	KS11	0,54	0,227	Valid
	KS12	0,569	0,227	Valid
Sistem Pelaporan	SP1	0,815	0,227	Valid
	SP2	0,862	0,227	Valid
	SP3	0,876	0,227	Valid
Akuntabilitas Kinerja Keuangan	AK1	0,47	0,227	Valid
	AK2	0,45	0,227	Valid
	AK3	0,618	0,227	Valid
	AK4	0,664	0,227	Valid
	AK5	0,568	0,227	Valid
	AK6	0,722	0,227	Valid
Sistem Pengendalian Internal	SPI1	0,65	0,227	Valid
	SPI2	0,72	0,227	Valid
	SPI3	0,762	0,227	Valid
	SPI4	0,726	0,227	Valid
	SPI5	0,709	0,227	Valid
	SPI6	0,669	0,227	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r

tabel. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masing-masing item tersebut dinyatakan valid dan Item yang valid dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2. Uji Realibilitas

Uji reliabel digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* (α), dimana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila *Alpha Cronbach* (α) > 0,600. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas

NO	Variabel	<i>Cronbach' Alpha</i>	Keterangan
1	<i>Intergovernmental Revenue</i>	0,787	Reliabel
2	Ketepatan Sasaran Anggaran	0,819	Reliabel
3	Sistem Pelaporan	0,803	Reliabel
4	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	0,606	Reliabel
5	Sistem Pengendalian Internal	0,794	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,600, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja keuangan dan sistem pengendalian internal yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat variabel.

E. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Barus, 2016). Alat analisis yang digunakan uji ini adalah uji *one-Sampel Kolmogorov-Sminov*. Uji digunakan untuk menghasilkan angka yang detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikan uji *Kolmogorov-Sminov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar $> 0,05$.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* 0,939 jadi dapat disimpulkan data tersebut diatas tingkat kepercayaan 5%. Maka data tersebut menunjukkan terdistribusi normal karena data distribusi normal apabila hasil uji dari *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut

:

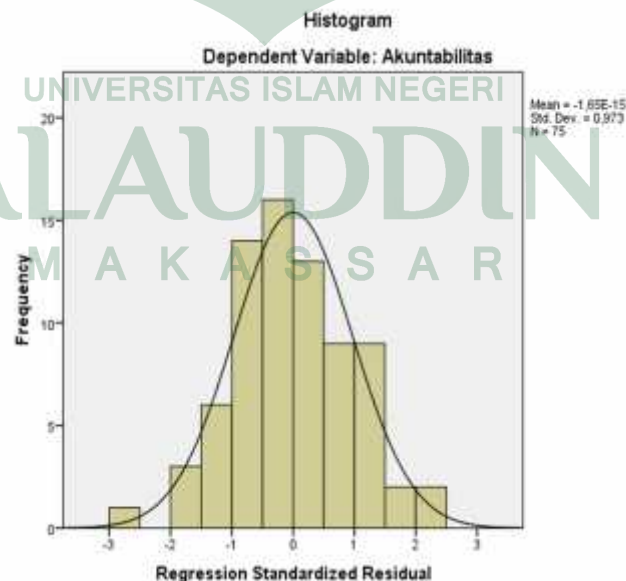
Tabel 4.17
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,64982662
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,040
Kolmogorov-Smirnov Z		,533
Asymp. Sig. (2-tailed)		,939
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

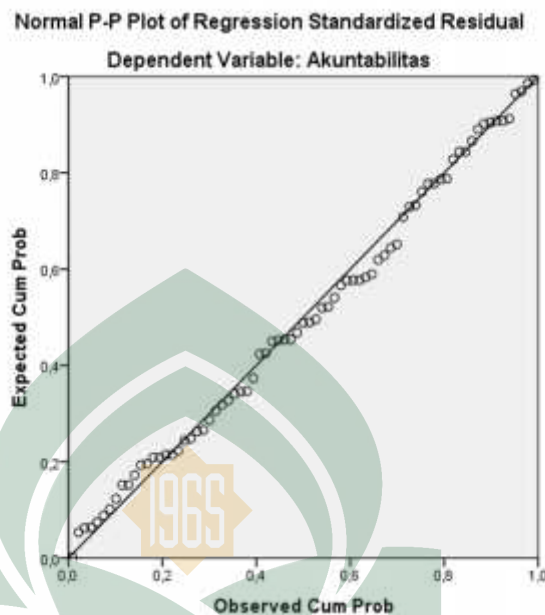
Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Adapun faktor lain yang digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi normal yakni dengan menggunakan grafik histogram dan grafik normal plot sebagai berikut:

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram



Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot



Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan dan kekiri. Sedangkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik *normal probability plot*.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor*

(VIF). Yang pertama, jika nilai *tolerance* diatas nilai 0,10 dan nilai VIF kurang dari nilai 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. Kedua, jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Hasil Uji multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	<i>Intergovernmental revenue</i>	,747	1,339
	Ketepatan Anggaran	,668	1,497
	Sistem Pelaporan	,827	1,209
	Pengendalian Internal	,899	1,112
a. Dependent Variable: Akuntabilitas			

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

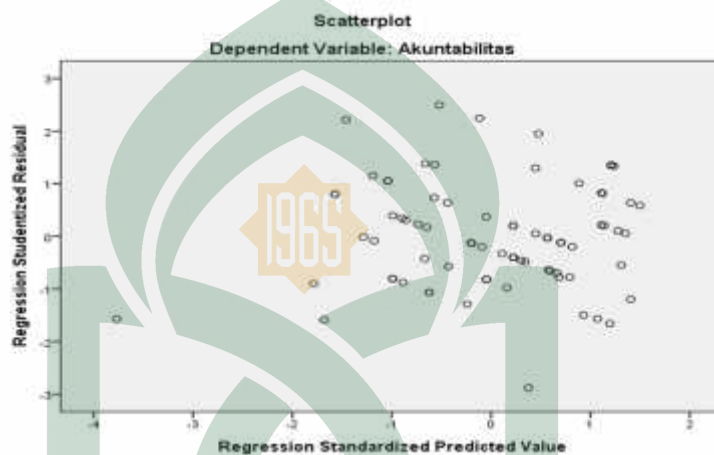
Dari hasil pengujian pada tabel 4.18 diatas, menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai < 10 pada variabel *inergovernmental revenue* senilai 0,747, ketepatan sasaran anggaran 0,668, sistem pelaporan 0,827 dan sistem pengendalian senilai 0,899. Berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai variabel memiliki nilai lebih < 10 . Hasil ini didukung oleh nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10. variabel *inergovernmental revenue* senilai 1,339, ketepatan sasaran anggaran 1,497, sistem pelaporan 1,209 dan sistem pengendalian senilai 1,112.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Sactter Plot*. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Scatter Plot* dilihat sebagai berikut

Gambar 4.5
Hasil Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot



Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas kinerja keuangan berdasarkan *intergovermental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan sistem pengendalian internal.

Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji *glejser*. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.19. Jika nilai signifikansi

lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas sebagai berikut :

Tabel 4.19
Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,075	1,617		1,902	,061
	<i>Intergovernmental revenue</i>	,023	,087	,036	,268	,789
	Ketepatan Sasaran Anggaran	-,019	,034	-,078	-,552	,583
	Sistem Pelaporan	,050	,089	,072	,563	,575
	Sistem Pengendalian Internal	-,081	,045	-,221	-1,806	,075
a. Dependent Variable: AbsUt						
Sumber : Output SPSS 21 (2018)						

Hasil uji *Glejser* pada Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

F. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1, H_2 dan H_3 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (*intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja keuangan), sedangkan untuk menguji hipotesis H_4, H_5 dan H_6 , menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan

absolut residual atau uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H₁, H₂, dan H₃

Pengujian hipotesis H₁, H₂, H₃ dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,527 ^a	,278	,248	1,71803
a. Predictors: (Constant), SistemPelaporan, <i>Intergovernmental revenue</i> , Ketepatan Sasaran Anggaran				

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel diatas pada nilai R senilai 0,527 atau 52,7% menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai R pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 0,527 termasuk dalam kategori berpengaruh sedang karena berada pada interval 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan berpengaruh sedang terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.20 menunjukkan nilai R Square (R²) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*Independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,248 hal ini berarti 24,8% yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja keuangan

di pengaruhi oleh variabel *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan. Dan sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.21
Hasil Uji F- Uji Simultan

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.782	3	26.927	9.123	,000 ^b
	Residual	209.565	71	2.952		
	Total	290.347	74			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), SistemPelaporan, Intergovernmental,KetepatanAnggaran						
Sumber : Output SPSS 21 (2018)						

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 9,123 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana nilai F hitung (9,123) lebih besar dari F tabelnya sebesar 2,73(df1=4-1=3 dan df2 =75-4= 71).Berarti *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Tabel 4.22
Hasil Uji T – Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.273	2.603		4.331	.000
	<i>Intergovernmental revenue</i>	.004	.147	.003	.025	.980
	Ketepatan Anggaran	.139	.057	.296	2.439	.017
	SistemPelaporan	.453	.151	.332	2.998	.004
a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja Keuangan						

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 11,273 + 0,004X_1 + 0,135X_2 + 0,453X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan

a = Konstanta

X_1 = *Intergovernmental revenue*

X_2 = Ketepatan Sasaran Anggaran

X_3 = Sistem Pelaporan

e = *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 11,273 mengidentifikasi bahwa jika variabel independen (*intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan) adalah nol maka akuntabilitas kinerja keuangan akan terjadi sebesar 11,273.
- 2) Koefisien regresi B (*Unstandardized Coefficients*) variabel *intergovernmental Revenue* (X_1) sebesar 0,004 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel *intergovernmental Revenue* akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan sebesar 0,004.
- 3) Koefisien regresi B (*Unstandardized Coefficients*) variabel ketepatan sasaran anggaran (X_2) sebesar 0,139 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel ketepatan sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 0,139.

- 4) Koefisien regresi B (*Unstandardized Coefficients*) variabel sistem pelaporan (X_2) sebesar 0,453 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sistem pelaporan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 0,453.

Hasil interpretasi atas hipotesisi penelitian (H_1, H_2 , dan H_3) sebagai berikut :

- a) *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_1)

Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa tingkat *intergovernmental revenue* memiliki t hitung sebesar $4,331 > t$ tabel sementara $\text{sig.} = 0,05$ dan $df = n - k$, yaitu $75 - 4 = 71$ maka tabel sebesar 1,666 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,004 dan tingkat signifikansi 0,980 yang lebih besar dari 0,05, maka H_1 ditolak. Hal ini berarti *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang belum mampu memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dengan baik. Dimana, nilai belanja pegawai/aparatur daerah lebih besar tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik.

- b) Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_2)

Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel ketepatan Sasaran Anggaran memiliki t hitung sebesar $2,439 > t$ tabel sementara tingkat $\text{sig.} = 0,05$

dan $df = n-k$, yaitu $75-4= 58$ t tabel 1,666 dengan koefisien beta (*Unstandardized Coefficients*) sebesar 0,139 dan tingkat signifikansi 0,017 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_2 diterima. Hal ini berarti ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan terbukti. Dengan demikian hipotesis kedua menunjukkan bahwa semakin baik ketepatan sasaran anggaran yang dilakukan maka, semakin baik pula akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan daerah.

c) Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_3)

Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel sistem pelaporan t hitung $2,998 > t$ tabel 1,666 dengan tingkat signifikan 0,004 yang lebih kecil dari 0,005 maka, H_3 diterima. Hal ini berarti sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan terbukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan yang dilakukan pegawai pada pemerintahan daerah maka pertanggungjawaban tentang penusunan anggaran akan semakin baik dan tepat.

2. Hasil Uji Regresi Moderasi Dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak Terhadap Hipotesis Penelitian H_4, H_5 , dan H_6

Menurut Ghazali (Frucot dan Shaeron, 2013) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen. Interaksi ini lebih disukai karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X_1 dan X_2 dan berpengaruh terhadap Y . Misalkan jika skor tinggi untuk variabel *inergovermental revenue*, ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berasosiasi dengan skor rendah pertimbangan etis (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolute yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel *inergovermental revenue*, ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berasosiasi dengan skor tinggi dari sistem pengendalian internal (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 ZM + \beta_5 |X_1 - ZM| + \beta_6 |X_2 - ZM| + \beta_7 |X_3 - ZM| + e$$

Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi dapat dijabarkan dalam tabel dibawah :

Tabel 4.23
Hasil Keofisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,615 ^a	.379	.314	1.64103
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(Intergovernmental), X1_M, Zscore(SistemPelaporan), Zscore(PengendalianInternal), Zscore(KetepatanAnggaran), X2_M Sumber : Output SPSS 21 (2018)				

Berdasarkan tabel 4.23 diatas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,379 dengan tingkat persentase sebesar 37,9%. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja keuangan dipengaruhi oleh *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, sistem pelaporan dengan sistem pengendalian internal hanya 37,9% tingkat persentase yang dimiliki. Sedangkan sisanya sebesar 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.24
Hasil Uji F-Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109.917	7	15.702	5.831	,000 ^b
	Residual	180.429	67	2.693		
	Total	290.347	74			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(Intergovernmental revenue), X1_M, Zscore(Sistem Pelaporan), Zscore(Pengendalian Internal), Zscore(Ketepatan Anggaran), X2_M						

Sumber : Output SPSS (2018)

Hasil Annova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,831 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel *intergovernmental revenue*, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan, X1_M, X2_M, dan X3_M secara bersama – sama atau simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan.

Tabel 4.25
Hasil Uji T – Uji Parsial

		Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.727	.414		57.244	.000
	Zscore (<i>Intergovernmental revenue</i>)	-.065	.226	-.032	-.286	.776
	Zscore (Ketepatan Anggaran)	.520	.237	.259	2.197	.031
	Zscore (Sistem Pelaporan)	.685	.212	.350	3.231	.002
	Zscore (Pengendalian Internal)	.411	.215	.201	1.911	.060
	X1_M	-.232	.274	-.094	-.847	.400
	X2_M	-.073	.337	-.028	-.216	.830
	X3_M	.901	.361	.288	2.495	.015

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Sumber : Output SPSS 21 (2018)

a) Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_4)

Berdasarkan 4.25 menunjukkan hasil uji selisih mutlak bahwa variabel moderating X1_M mempunyai tingkat t hitung sebesar $-0,847 <$ dari t tabel 1,666 dengan tingkat signifikan sebesar 0,400 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti H_4 ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal bukan

variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah variabel *intergovernmental revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Jadi hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang ditolak.

b) Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_5)

Pada tabel 4.25 berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel moderating $X2_M$ memiliki t hitung sebesar $-0,126 <$ dari t tabel sebesar 1,666 dengan tingkat signifikan 0,830 yang lebih besar dari 0,05 artinya H_5 tidak diterima. Hal ini berarti sistem pengendalian internal bukan variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah variabel ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Jadi hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan daerah di Kabupaten Enrekang ditolak.

c) Sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_6)

Berdasarkan tabel 4.25 dari hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel moderating $X3_M$ memiliki t hitung sebesar $2,495 >$ dari t hitung 1,666 dengan tingkat signifikan sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti sistem pengendalian internal merupakan variabel yang memperkuat hubungan antara variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Jadi hipotesis

keenam (H_6) yang menyatakan sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan diterima.

G. Pembahasan

1. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_1)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hipotesis dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan dari variabel *intergovernmental revenue* dimana koefisien beta *unstandardized* sebesar 0,004 dan tingkat signifikansi 0,980 yang lebih besar dari 0,05 yang artinya ditolak. Variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Walaupun, tingkat ketergantungan (*intergovernmental revenue*) semakin meningkat ataupun menurun pada pemerintahan pusat maka tidak ada pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2015) menjelaskan bahwa salah satu fenomena *flypaper effect* menyiratkan bahwa pemerintah daerah yang lebih bergantung pada dana perimbangan daripada Pendapatan Asli Daerah merupakan daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber dayanya secara lebih efisien dan ekonomis. Namun, memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah karena ketergantungannya pada dana transfer dari pusat. Di samping itu Masdiantini

(Patrick, 2016) “ *intergovernmental revenue* sebagai salah satu pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiaya kegiatan pemerintah daerah”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Aziz (2014) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Di dalam pemerintahan daerah diperlukan adanya dana pusat yang diserahkan ke daerah untuk mengurangi ketimpangan baik secara vertikal maupun horizontal. Ketergantungan yang dimiliki pemerintah daerah di Indonesia terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu permasalahan terkait otonomi dan desentralisasi keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil yang didapat bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014), Mulyadi (2017) serta Utomo (2015) yang menyatakan bahwa “*intergovernmental revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan”. Akan tetapi, hasil penelitian ini dapat diperkuat atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016), dan Sesoyaningsityas (2012) yang menyatakan “variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah”. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang belum mampu memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya. Ini dapat terlihat pada besarnya nilai belanja pegawai/belanja aparatur daerah yang lebih besar dan tidak sebanding

dengan belanja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang. Sehingga tujuan utama dari pemberian dana perimbangan tidak tercapai dengan baik.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrument akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan menggunakan uang publik. Kontribusi teori kepatuhan dalam penelitian dimana aparat pemerintahan terutama bagian dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pusat harus patuh pada peraturan pemerintah yang berlaku sesuai Pasal 55 PP No. 78 tahun 2007 tentang dana perimbangan

2. Pengaruh ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H₂)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Hipotesis kedua (H₂) diterima. Hal ini sejalan dengan Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hipotesis ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai dari koefisien beta *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,139 dengan tingkat signifikan 0,17 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya, diterima. Hal ini berarti semakin baik tingkat ketepatan sasaran anggaran yang dilakukan pada pemerintahan daerah maka akan semakin baik pula kinerja yang akan dipertanggungjawabkan.

Menurut Dewi (2015) menjelaskan bahwa adanya kejelasan sasaran anggaran secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Meningkatnya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan ketepatan anggaran pendapatan dan belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). kemudian penelitian lain yang berbeda Pratiwy (2013) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi dilapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Ketepatan sasaran anggaran pada pemerintah daerah akan memberikan implikasi terhadap kinerja aparatur daerah yang lebih baik, maka hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan hasil akhir (*output*) organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Kegiatan sektor publik saat ini memiliki perhatian yang serius oleh masyarakat terutama dalam pemerintahan Kabupaten Enrekang. Dimana sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat mulai dari perencanaan, tujuan sasaran operasional belum sesuai yang diinginkan masyarakat pada Kabupaten Enrekang. Menurut Mardiasmo (2009) “pemegang amanah (pemerintah) harus mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban”.

Mengacu teori *stewardship* dimana pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada masyarakat sebagai pihak pemeberi amanah (*principal*) dengan mengungkapkan segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi

tersebut. Aparat pemerintah harus bertindak sesuai yang di harapkan mengembangkan sarana dan prasana baik fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan masyarakat juga harus mendukung hasil kinerja yang di lakukan oleh aparat pemerintah dalam pembangunan dan perkembangan Kabupaten Enrekang. Kedua kepentingan tersebut dipertemukan sehingga menjadi rumusan komitmen yang disepakati sebagai amanah dan tanggungjawab bersama dalam membangun daerah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini, didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2016) dan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa Ketepatan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD. Ini menunjukkan bahwa semakin baik ketepatan sasaran anggaran yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Enrekang maka, akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang terjadi pada pemerintahan tersebut.

3. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan (H_3)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini sejalan dengan dugaan hipotesis atau yang diajukan yaitu sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hipotesis ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien beta *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,453 dengan tingkat signifikan 0,004 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya diterima. Hal ini berarti bahwa semakin

baik sistem pelaporan yang ada di dalam pemerintahan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja keuangan yang ada pada pemerintahan di Kabupaten Enrekang.

Pemerintah daerah selaku pengelolaan dan publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Seperti yang dikatakan Paramitha (2016) bahwa pemerintah daerah dituntut memiliki sistem informasi akuntansi yang andal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah lemah, maka kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan sistem tersebut menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa Semakin baik sistem pelaporan yang ada pada SKPD Kabupaten Enrekang maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintahan. Penggunaan sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangan bertujuan agar institusi tertib administrasi dalam penyusunan sampai kepada pelaporan dan kinerja pada laporan keuangan tersebut. Disisi lain Suhaesti (2016) menyatakan bahwa sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Laporan yang digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik meliputi informasi yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan.

Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal maupun organisasi. Pemerintah yang mempunyai banyak informasi dan

bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, harus memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan laporan keuangan yang baik. Dan aparat pemerintah harus mematuhi peraturan sesuai Pengelolaan Keuangan berdasarkan undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan Negara maupun keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2010) yang menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam Memoderasi *Intergoovermental Revenue* terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (H_4)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Hipotesis keempat (H_4) ditolak. Hal ini, tidak sejalan dengan dugaan hipotesis (H_4) yang diajukan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi *Intergoovermental Revenue* terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Hipotesis ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien beta *Unstandardized Coefficients* sebesar -0,232 dengan tingkat signifikan 0,400 dimana lebih besar dari 0,05 artinya H_4 ditolak. Hal ini berarti sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi variabel *Intergoovermental Revenue* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Pengendalian internal yang terdapat dalam instansi pemerintah memiliki tingkat kinerja yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian yang saya lakukan di SKPD Kabupaten Enrekang tingkat ketergantungan (*intergovernmental revenue*) dengan adanya sistem pengendalian internal tidak dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Enrekang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja keuangan pada instansi pemerintahan di Kabupaten Enrekang tidak ditentukan oleh sistem pengendalian internal tetapi ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhinya. Maka dari itu, ada atau tidaknya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *intergovernmental revenue* ke akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Enrekang.

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam Memoderasi Ketepatan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (H_5)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hipotesis lima (H_5) ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan dugaan hipotesis yang diajukan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi ketepatan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien beta *Unstandardized Coefficients* sebesar -0,73 dengan tingkat signifikan 0,830 dimana lebih besar dari 0,05 artinya ditolak. Hal ini berarti sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi variabel ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Secara umum, ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai target anggaran. Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi (2001:489) yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya. Walaupun sistem pengendalian internal tidak memoderasi ketepatan sasaran anggaran, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tetap harus patuh dan taat pada peraturan pemerintah daerah dalam perundang – undangan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran dengan adanya sistem pengendalian internal tidak dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Enrekang tidak ditentukan oleh sistem pengendalian internal, tetapi ada faktor lain langsung memengaruhinya yang belum diteliti dalam penelitian ini. Variabel sistem Pengendalian internal ini bukan variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam Memoderasi Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (H_6)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hipotesis keenam (H_6) direjeksi. Hal ini sejalan dengan dugaan hipotesis yang diajukan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hasil

pengujian hipotesis ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien beta *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,903 dengan tingkat signifikan 0,15 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya diterima. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Anjarwati (2012) menjelaskan bahwa Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas dapat meliputi lingkungan internal dan eksternal yang dapat membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Semakin efektif pengendalian internal dalam organisasi maka semakin efektif dan akurat sistem pelaporan yang ada pada pemerintahan. Ketika sistem pelaporan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan baik maka semakin baik akuntabilitas publik. Dan sebaliknya jika, suatu organisasi melakukan pelaporan anggaran yang kurang memadai maka akan menimbulkan hambatan dan akhirnya informasi kualitasnya memburuk dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya efektifitas pengendalian internal yang ada dalam suatu organisasi akan mendorong akuntabilitas publik baik dalam kinerja maupun dalam pengelolaan keuangan. Ketika sistem pelaporan dilakukan dengan baik dengan sistem pengendalian akan membuat kinerja pegawai pada pemerintahan semakin baik terhadap akuntabilitas kinerja keuangan sehingga setiap manajer pada semua tingkatan SKPD Kabupaten Enrekang akan meningkatkan kinerja manajerialnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memperkuat sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Enrekang. Dimana, jika sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan semakin baik maka pemerintah Kabupaten Enrekang mampu menyediakan informasi keuangan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Mengacu pada teori *stewardship* dimana pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengembangkan pemerintahan Kabupaten Enrekang. Kepercayaan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan mempublikasikan laporan keuangan atas anggaran yang selama ini digunakan baik itu dana dari pusat maupun dari daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2012) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan harus efektif dan akurat sesuai yang di atur dalam Pengelolaan Keuangan berdasarkan undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan Negara maupun peraturan perundangan No. 7 Thn 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu uapaya pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti intergovernmental revenue semakin meningkat ataupun menurun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini di karenakan pemerintah Kabupaten Enrekang belum mampu memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dengan baik. Dimana, nilai belanja pegawai/aparatur daerah lebih besar tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik.
2. Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti semakin baik tingkat ketepatan sasaran anggaran yang dilakukan pada pemerintahan daerah maka akan semakin baik pula kinerja yang akan dipertanggungjawabkan.
3. Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem pelaporan yang ada di dalam pemerintahan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja keuangan yang ada pada pemerintahan di Kabupaten Enrekang.

4. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi intergovernmental revenue terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja keuangan pada instansi pemerintahan di Kabupaten Enrekang tidak ditentukan oleh sistem pengendalian internal tetapi ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhinya.
5. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi sistem ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Enrekang tidak ditentukan oleh sistem pengendalian internal.
6. Sistem pengendalian internal memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini berarti jika sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan semakin baik maka pemerintah Kabupaten Enrekang mampu menyediakan informasi keuangan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai SAP.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survei secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
2. Dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Enrekang 19 SKPD yang bersedia mengisi kuesioner yaitu 10 dinas - dinas. Hal ini disebabkan karena permasalahan perizinan yang rumit dan kesibukan pelatihan serta

kunjungan kerja para pegawai pada SKPD tersebut. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, bukan hanya pada sektor publik yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetapi juga dapat dilakukan pada sektor swasta yaitu perusahaan. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua pegawai SKPD di Indonesia, karena latar belakang dan letak geografis yang berbeda-beda.

C. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang, diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintah daerah terutama bagian keuangan dengan melakukan peningkatan efektivitas pengendalian dan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dapat menempatkan system pengendalian internal pada letak yang strategis.
2. Bagi Penyusun Anggaran diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang baik, jujur, efisien pada dirinya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penyusunan anggaran.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan untuk lebih memaksimalkan sumber daya manusia dalam mencegah terjadinya ketidakkonsistenan. Sehingga program kerja yang dihasilkan mampu memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Republik Indonesia. Pasal 55 PP Nomor 8 tahun 2007 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah.
- Abdullah, Dr.Muntu, Wa Ode Aswati, dan Astrinigita. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan senjangan anggaran Terhadap kinerja pejabat eselon iii dan iv Pada dinas kesehatan kota kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2): 2017. 61-72.
- Afrida, Nur. 2013. Pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern Pemerintah terhadap kinerja manajerial skpd (studi empiris pada pemerintah kota padang). *Artikel ilmiah*. UNP: Padang.
- Aldina, Irma. 2016. Pengaruh kualitas dipa, system pengendalian internal Pemerintah dan system anggaran berbasis kinerja Terhadap tingkat penyerapan anggaran (studi empiris pada skpd di kota padang). *Artikel*. Universitas Negeri Padang. UNP: Padang.
- Anjarwati, Mei. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*. 1(2): 2012.1-7.
- Anto, FX. Menuju Teori *Stewardship* Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*. 1(2): 2010. 61-80.
- Armaja, Ridwan ibrahim, dan Aliamin. Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan danBelanja daerah terhadap kinerja keuangan(studi pada kabupaten/kota di aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 3(2): 2015. 168-181.
- Azis, Al Qadar. 2014. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. *Skripsi S1*. Universitas Negeri Gorontalo.

- Chairudin, Ahmad dan Sugeng Praptoyo. Analisis Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(9): 2017. 1-22.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. 2012.
- Dewi, Made Astari Pradnya, dan Ni Luh Supadmi. Pengaruh ketetapan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik pada akuntabilitas kinerja SKPD. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 12(1): 2015. 50-63.
- Emilia. Pengaruh Partisipasi dalam Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Fainess*. 3(3): 2013. 2303-0348.
- Fadzil, Hanim Faudziah, Nyoto Harryanto. Fiscal Decentralization After Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *World Review of Bussines Research*. 1(2): 2011. 51-70.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Halim, Abdul dan Muhamad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah, edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Herawaty, Netty. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. 13(2): 2011. 31-36.
- Indra, Luh Febri, Putu Gede Diatmika, Made Arie Wahyuni. Pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran Anggaran dan efektivitas pengendalian internal Terhadap akuntabilitas kinerja organisasi public (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Gianyar). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. 8(2): 2017. 1-13.
- Lesmana, Desi dan Mutiara Maimunah. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi pada Instansi Pemerintahan Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi*. 12(1): 1-124.

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan ke empat*. Penerbit Andi: Yogyakarta, 2009.
- Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *Intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit bpk pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14(2): 2016. 1150-1182.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental revenue* dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *KOMPARTEMEN*. 15(1): 2017. 57-66.
- Naipospos, Hevyana, Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran Anggaran dan evaluasi anggaran Terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru). *JOM FEKON*. 2(2): 2015. 1-15.
- Natalya, Beby dan Dwi Risma Depiyanti Annisa Kusumawardani. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 13(2): 2016. 115-123.
- Nengsih, Herda. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial pt. Perkebunan Nusantara V, pekanbaru. *Jurnal akuntansi dan keuangan*. 6(2): 2017. 1-16.
- Nurhalimah, Darwanis, Syukry Abdullah. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di pemerintah aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 2(1): 2013. 27-36.
- Pamungkas, Bambang. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. 12(2): 2012. 82-93.
- Pangumbalerang, Angreini dan Sherly Panatik. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Jurnal EMBA*. 2(2): 2014. 800-808.
- Paramitha, Ida Ayu Made Dwiki dan Gayatri. 2016. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem

- Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(3): 2016. 2457-2479.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation. The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*. Publication No. AAT 3266180.
- Pratiwy, Suwandi, Annisa. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rachmawi, Sella, Rini dan Yessi Fitri. Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. 9(1): 2016. 143-160. 2012.
- Raharjo, Eko. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*. 2(1): 2007. 37-46.
- Riawan. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara. *JESP*. 8(1): 2016. 50-60.
- Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 4(1): 2008. 14–33.
- Sardi, Santha Julia, H. Akhmad Rifa'i. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris pada sat kerbalai besar Bmkg wilayah iii den pasar-bali). *Jurnal Investasi*. 12(2): 2016. 168-172.
- Sari, Indah Puspa. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pad, *leverage* Dana perimbangan dan ukuran legislative terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada kab/kota pulau sumatra). *JOM FEKON*. 3(1): 2016. 679-692.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh leverage, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan Pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*. 1(1): 2012. 1-6.

- Siregar, Helly Aroza. Analisis pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan danaAlokasi umum dan pertumbuhan dana alokasi khusus terhadap pembangunan Manusia di kota pekanbaru dengan pertumbuhan belanja modal sebagai Variabel pemoderasi. *KURS*. 2(1): 2017. 1-13.
- Suhaesti, Siti Ruri. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon*. 3(1): 2016. 705-719.
- Suryaningsih, Ni Made, Eka Ardhani, dan Sisdayani. Karakteristik pemerintah daerah dan opini audit pada Kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-JurnalAkuntansi Universitas Udayana*. 15(2): 2016. 1453-1481.
- Suwandi, AnnisaPratiwy. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadapKinerja PemerintahDaerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang).*Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Syarifudin, Akhmad. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*. 14(2): 2014. 26-44.
- Tarjono dan Astha Nugraha. Pengaruh partisipasi anggaran dan desentralisasi organisasi terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi(studi analisis pada pemerintah kabupaten pemalang). *Media ekonomi dan manajemen*. 30(1): 2015. 85-100.
- Tresnawati, Rina. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional*. Forum Bisnis & Keuangan I. Universitas Widyatama: 2012. 139-151.
- Utomo, Kharis Prasetyo. 2015. Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan Temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun Anggaran 2012). *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyuni, Raja Adri Satriawan Surya, dan Enni Savitri. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau: Pekanbaru*.

- Wardhana, Gede Ary Surya, Ni Ketut Rasmini, dan Ida Bagus Putra Astika. Pengaruh kompetensi pada akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayan*. 4(9): 2015. 571-598.
- Wibisono, Seta. Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal ilmiah dan riset akuntansi*. 5(9): 2016. 1-22.
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kepastian Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Sumatra Barat). *Artikel*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, UNP.
- Yuliansyah dan Munandar. Kepatuhan Apratur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 di Wilayah Kevamatan SAMBAS Kabupaten SAMBAS. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 5(2): 2017. 181-192.
- Zakiyudin, M.Ali dan Suyanto. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. 2(1): 2015. 89-96.
- Zeyn, Elvira. Pengaruh *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 1(1): 2011. 21-37.
- Zoelisty, Capridiea dan Adityawarman. Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 3(3): 2014.1-12.

L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nomor : 352/IEB.I/PP.00.9/01/2018

Samata, 26 Januari 2018

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. Kepala UPT P2T BKPMD

Di --

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Jasmiati**
NIM : 10800113026
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Akuntansi**
Semester : **IX (Sembilan)**
Alamat : **Jl. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya "**Intergovernmental revenue , ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel mederasi (studi enpiris pada Pemerintahan Kab. Enrekang)**"

Dengan Dosen pembimbing:

1. Memen Suwandi, SE., M.Si

2. Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Enrekang.**

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Prof. Dr. H. Asse, M.Ag.
198703 1 002

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata/Gowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 0 8 6 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 824/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Enrekang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 352/EB.I/PP.00.9/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **JASMIATI**
Nomor Pokok : 10800113026
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" INTERGOVERNMENTAL REVENUE, KETEPATAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MEDERASI (STUDI ENPIRIS PADA PEMERINTAHAN KAB. ENREKANG) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Februari s/d 14 April 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Januari 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*





PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 21 Februari 2018

Nomor : 76/DPMPTSP/IP/II/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kab. Enrekang
Masing-masing
Di
Tempat

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 824/S.01/PTSP/2018 tanggal 29 Januari 2018, menerangkan bahwa mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama : **Jasmiati**
Tempat Tanggal Lahir : Balla, 13 Desember 1994
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Balla Tengah, Kel. Balla Kec. Baraka

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Intergovernmental Revenue, Ketetapan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 21 Februari 2018 s/d 14 April 2018

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

a.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



HARWAN SAWATI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
04. Camat Enrekang.
05. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
06. Yang Bersangkutan (**Jasmiati**).
07. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Pinang Telp.Fax (0420) 21079
Website: <http://dpmpptsp.enrekangkab.go.id> Email : dpmpptsp@enrekangkab.go.id
ENREKANG

SURAT KETERANGAN
No. II /S-K/DPMPTSP/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARWAN SAWATI,SE
NIP : 19670329 198612 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Enrekang
Alamat : Jln. Jend. Sudirman KM. 3 Pinang Enrekang

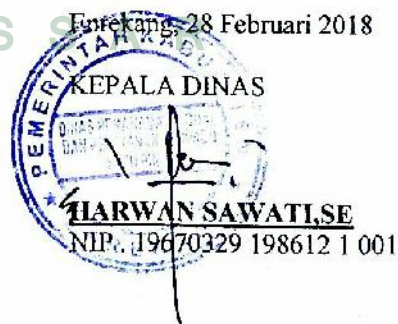
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Jasmianti
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 10800113026
Alamat : Balla Tengah, Kel. Balla Kab. Enrekang

Telah melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Izin Penelitian Nomor : 76/DPMPTSP/IP/II/2018 dengan judul penelitian “ **INTERGOVERNMENTAL REVENUE, KETETAPAN SASARAN ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG)**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 28 Februari 2018





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I: Jl. Slt. Alauddin No. 1 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Gowa Tlp. (0411) 841879 Fax (0411) 841840

Nomor : *24* EB.I/PP.00.9/2018
Lampiran : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Jasmiati/10800113026

Samata, 18 Januari 2018

Kepada Yth :

1. **Memen Suwandi, SE., M. Si.** Sebagai Pembimbing I
2. **Nur Rahma Sari, SE.Acc., Ak.** Sebagai Pembimbing II

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 25 Januari 2018
Waktu : 09.00 - 12.00
Judul Skripsi : Intergovernmental revenue ketepatan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian Intern sebagai variabel moderasi (Studi emprisis pada pemerintahan Kabupaten Enrekang)
Tempat : Ruang L. 206

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 4716 /EB.1/PP.00.9/06/2018

Samata, 06 Juni 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Seminar Hasil

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Jasmiati
NIM : 10800113026
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : Intergovernment Revenue ketetapan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 08 Juni 2018

Waktu : 09.00 - 16.00 WITA

Tempat : Ruang Seminar 204

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NID 9581022 198703 1 002





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 398 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif Jasmiali : NIM: 10800113026
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua Sekretaris Penguji Dirasah Islamiyah Penguji Akuntansi Keuangan Penguji Auditing Pelaksana	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. : Nurmiah Muin, S.IP., MM. : Dr. Syaharuddin, M.Si. : Mustakim Muchlis, SE., M.Si. : Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak. : Kumati Syukur, S.Ag.
---	--
 2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
 4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

M A K A S S A R

Ditetapkan di : Samata-Gowa
 Pada tanggal : 21 Februari 2018
 Dekan,


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Pinang Telp.Fax (0420) 21079

Website: <http://dpmpdsp.enrekangkab.go.id> Email : dpmpdsp@enrekangkab.go.id

ENREKANG

SURAT KETERANGAN

No. II /S-K/DPMPDSP/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARWAN SAWATLSE
NIP : 19670329 198612 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Enrekang
Alamat : Jln. Jend. Sudirman KM. 3 Pinang Enrekang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Jasmiati
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 10800113026
Alamat : Balla Tengah, Kel. Balla Kab. Enrekang

Telah melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Izin Penelitian Nomor : 76/DPMPDSP/IP/II/2018 dengan judul penelitian “ **INTERGOVERNMENTAL REVENUE, KETETAPAN SASARAN ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG)**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 28 Februari 2018



HARWAN SAWATLSE

NIP. 19670329 198612 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sirri Alauddin No. 63 Makassar Tlp. 0411 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **4881/EB.I/PP.00.9/3/2018**
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, **11** Juli 2018

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Jasmiati
NIM : 10800113026
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : "Intergovernment Revenue, ketetapan sasaran anggaran,
dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja
keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai
variabel moderasi (Studi Empiris pada Pemerintahan
Kabupaten Enrekang)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juli 2018
Waktu : 09.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Bekana

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 15/S/ TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIMBING / PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama : Jasmiati, Nim 10800113026 Tanggal 9 Oktober 2017 Untuk Mendapatkan Pembimbing SKRIPSI Dengan Judul : "Intergovernmental Revenue, Ketepatan Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kab. Enrekang)
- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Membantu Kelancaran Penelitian Dan Penyusunan SKRIPSI Mahasiswa Tersebut, Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Pembimbing / Pembantu Pembimbing Penyusunan SKRIPSI Mahasiswa Tersebut Diatas
b. Bahwa Mereka Yang Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Ini Dipandang Cakap Dan Memenuhi Syarat Untuk Diserahi Tugas Sebagai Pembimbing / Pembantu Pembimbing Penyusunan SKRIPSI Mahasiswa Tersebut Diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 Yang Disempurnakan Dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI 25 Tahun 2013 Dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 Jo Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara (i)
1. **Memen Suwandi, SE., M.Si** Sebagai Pembimbing Pertama
2. **Nur Rahmah Sari, SE., M.Ace., Ak** Sebagai Pembimbing Kedua
- Kedua** : Tugas Pembimbing Pembantu Pembimbing Dalam Penelitian Dan Penyusunan SKRIPSI Mahasiswa (i) Adalah Memeriksa Draft Skripsi Dan Naskah Skripsi, Memberi Bimbingan, Petunjuk-Petunjuk, Perbaikan Mengenai Materi, Metode, Bahasa Dan Kemampuan Menguasai Masalah
- Ketiga** : Segala Biaya Yang Timbul Akibat Dikeluarkannya Surat Keputusan Ini Dibebankan Kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Di Dalamnya Akan Diperbaiki Sebagaimana Mesrinya.
- Kelima** : Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Masing-Masing Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggungjawab



Saniata-Gowa
10 Oktober 2017

Ambo, Asse., M.Ag
81 022 198703 1 022

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Saniata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. ...



**+KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 821 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Jasmiafi, NIM: 10800113026
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Jasmiafi, NIM: 10800113026** untuk melaksanakan seminar hasil .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Musllmin Kara, M.Ag.
Pembimbing : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Pembimbing II : Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak.
Penguji I : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Penguji II : Drs. Thamrin Logawali, MH.
Pelaksana : Kurniati Syukur, S.Ag.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Tanggal : 05 Juni 2018



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NIP.19581022 198703 1 002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 0863 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Jasmiati
NIM : 10800113026
Tanggal : 06 Juli 2018
Mahasiswa Jurusan : AKUNTANSI
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Intergovernment Revenue, ketetapan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi (Studi Emplris pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Penguji II : Drs. Thamrin Logawali, MH.
Pembimbing I : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Pembimbing II : Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak.
Pelaksana : Kurniati Syukur, S.Ag.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada tanggal : 06 Juli 2018

Dekan



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sirri Alauddin No. 63 Makassar Tlp. 0411 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **4881/EB.I/PP.00.9/3/2018**
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, 11 Juli 2018

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Jasmiati
NIM : 10800113026
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : "Intergovernment Revenue, ketetapan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juli 2018
Waktu : 09.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Bekana

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi, yang mana salah satu persyaratannya adalah penulisan skripsi, maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagaimana "Daftar Kuesioner" terlampir.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah "***Intergovernmental Revenue, ketepatan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi***" untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i meluangkan waktu untuk dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.

Bapak/Ibu dan Saudara/i cukup memberikan tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang diberikan :

Jawaban Bapak/Ibu dan Saudara/i berikan akan dijamin kerahasiaannya serta orientitasnya. Kejujuran dan kebenaran jawaban yang Bapak/Ibu dan Saudara/i berikan adalah bantuan yang tidak ternilai bagi saya. Akhirnya atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Samata-Gowa, Januari 2018

Peneliti



JASMIATI
10800113026

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada pertanyaan pilihan dengan memberi tanda () pada satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Nama SKPD :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin : Pria ☐ Wanita ☐
5. Pendidikan Terakhir : S3 ☐ S2 ☐ S1 ☐ D3 ☐
6. Jabatan :
7. Lama Kerja di SKPD :Tahun.....Bulan

Cara Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda () pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang diberikan :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Ragu-Ragu/Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

A. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL INTERGOVERNMENTAL REVENUE (X_1)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (3)	STS (1)
Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :						
1	Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan program yang dijalankan					
2	Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan program yang dijalankan					
3	Dana Bagi Hasil yang diberikan pemerintah pusat sudah dialokasikan secara tepat sesuai dengan program yang dijalankan					

B. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KETEPATAN SASARAN ANGGARAN (X_2)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (3)	STS (1)
Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :						
1	Ada kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja ini					
2	Adanya spesifikasi sasaran anggaran pada satuan kerja					
3	Saya dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program.					
4	Saya dapat mengetahui secara jelas <i>outcome</i> /hasil yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan.					
5	Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas.					
6	Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas & terukur.					
7	Ketidakjelasan sasaran anggaran perlu dihindari dalam penentuan rencana anggaran dimasing-masing unit					
8	Untuk membuat suatu laporan keuangan diperlukan perencanaan secara komprehensif.					
9	Pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program / kegiatan / proyek yang telah dilakukan.					

10	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.				
11	Penyusunan laporan keuangan disesuaikan yang sesuai dengan bidang organisasi.				
12	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program				

Sumber : Sari (2017)

C. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL SISTEM PELAPORAN (X₃)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (3)	STS (1)
Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :						
1	Adanya pembuatan laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
2	Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.					
3	Kejelasan dalam pencatatan penggunaan anggaran yang digunakan haruslah jelas dan terperinci.					

Sumber : Sally (2016)

D. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (Y)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (3)	STS (1)
Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :						
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
3	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program					
4	Kurangnya insentif berupa imbalan atau pengakuan positif tidak menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan di organisasi					
5	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) hasil dari program yang dilakukan					
6	Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/proyek					

Sumber : Sally (2016)

E. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Keterangan :

TPD : Tidak pernah digunakan (1)

SD : Sering Digunakan (4)

JSD : Jarang sekali digunakan (2)

SLD: Selalu Digunakan (5)

K : Kadang-kadang (3)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		SLD (5)	SD (4)	K (3)	JSD (3)	TPD (1)
Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan berikut :						
1	Seberapa seringkah pengendalian kualitas operasi misalnya dengan tabulasi data, pengolahan data metode sampling atau teknik statistik lainnya, digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.					
2	Seberapa seringkah pengendalian operasi dengan cara penetapan standar operasi prosedur berdasarkan peraturan dan analisis selisih digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.					
3	Seberapa seringkah audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
4	Seberapa seringkah evaluasi yang sistematis dan terjadwal digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
5	Seberapa seringkah penetapan target anggaran, digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					
6	Seberapa seringkah rencana jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.					

Sumber : Sally (2016)

LAMPIRAN 2
UJI PILOT TEST

A. Jawaban Responden dengan uji Pilot Test

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

NO	INTERGOVERNMENTAL REVENUE			TOTAL	SISTEM PELAPORAN			TOTAL
	IR1	IR2	IR3		SP1	SP2	SP3	
1	3	2	3	8	3	4	4	11
2	3	2	3	8	5	5	5	15
3	2	3	3	8	5	5	5	15
4	4	4	3	11	4	4	5	13
5	5	5	5	15	5	5	5	15
6	2	3	1	6	5	5	5	15
7	3	3	3	9	3	3	3	9
8	4	2	4	10	4	4	4	12
9	3	4	4	11	4	4	3	11
10	3	3	3	9	5	5	5	15
11	3	4	3	10	4	4	4	12
12	2	2	2	6	4	5	4	13
13	2	2	4	8	4	4	4	12
14	3	3	3	9	4	4	5	13
15	3	3	2	8	5	5	5	15
16	3	3	2	8	4	5	5	14
17	4	4	4	12	4	4	4	12
18	2	3	1	6	1	2	3	6
19	4	4	4	12	4	5	5	14
20	3	4	3	10	5	5	5	15
21	2	2	2	6	3	3	3	9
22	2	2	2	6	2	4	4	10
23	4	4	3	11	4	4	4	12
24	2	2	2	6	2	4	2	8
25	3	3	3	9	3	5	5	13
26	3	4	4	11	4	4	5	13
27	3	3	3	9	3	3	5	11
28	3	3	2	8	5	5	5	15
29	3	3	3	9	4	5	5	14
30	3	2	2	7	4	5	5	14
31	2	2	2	6	5	5	5	15
32	2	2	2	6	4	5	5	14
33	5	4	4	13	5	5	5	15
34	2	3	2	7	3	5	5	13
35	3	3	3	9	3	3	3	9

32	4	3	3	3	2	3	4	4	4	5	4	4	43
33	4	2	2	2	5	5	5	5	5	5	4	4	48
4	5	3	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	51
35	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37

NO	KETEPATAN SASARAN ANGGARAN						TOTAL	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL					TOTAL
	AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	
1	4	5	5	4	5	4	27	3	4	3	4	4	4
2	4	5	5	3	5	4	26	3	2	3	1	1	3
3	4	5	5	3	5	4	26	3	4	5	4	5	5
4	4	3	4	2	5	2	20	4	4	5	5	4	5
5	5	4	4	4	5	4	26	2	3	3	4	4	3
6	3	4	3	4	5	5	24	3	4	4	4	4	5
7	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3
8	4	5	4	4	4	4	25	3	4	4	5	4	4
9	4	4	4	3	4	3	22	3	4	4	5	5	3
10	5	4	4	2	5	5	25	4	4	4	4	4	4
11	4	5	4	4	4	4	25	3	3	2	2	3	3
12	3	5	4	4	5	5	26	3	4	3	3	5	3
13	2	4	3	2	4	4	19	2	4	5	3	3	3
14	4	4	5	4	5	5	27	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	3	5	5	25	3	3	4	4	4	4
16	4	5	4	4	5	5	27	3	3	4	4	3	4
17	3	5	4	3	4	5	24	3	3	3	4	3	4
18	4	3	5	4	3	3	22	2	4	2	4	5	1
19	4	4	4	3	4	4	23	4	3	2	4	3	4
20	2	3	4	2	4	4	19	3	4	4	3	5	4
21	4	4	4	3	4	4	23	3	3	3	4	1	3
22	4	4	4	2	4	4	22	3	4	3	3	3	3
23	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	3	4	5
24	3	4	2	3	3	4	19	4	3	4	3	5	4
25	4	3	4	3	5	4	23	3	4	4	3	4	4
26	4	4	4	3	5	4	24	3	4	4	4	5	4
27	4	4	5	3	4	5	25	3	3	4	4	3	4
28	5	4	4	2	3	5	23	4	3	5	3	4	4
29	5	5	5	3	5	5	28	4	4	4	4	4	3
30	5	5	4	4	3	3	24	3	3	4	3	4	4
31	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	5	5	5
32	4	4	4	3	4	4	23	3	3	3	3	3	3
33	5	5	4	4	5	4	27	4	4	5	5	4	4
34	4	4	4	2	4	4	22	4	3	4	4	4	5
35	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3

B. Uji Validitas Data

1. *Intergovernmental Revenue*

		Correlations			
		IR1	IR2	IR3	INTERGOVERNMENTAL REVENUE
IR1	Pearson Correlation	1	,668**	,709**	,908**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	35	35	35	35
IR2	Pearson Correlation	,668**	1	,531**	,835**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000
	N	35	35	35	35
IR3	Pearson Correlation	,709**	,531**	1	,868**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000
	N	35	35	35	35
INTERGOVERNMENTAL	Pearson Correlation	,908**	,835**	,868**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	35	35	35	35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

2. ketepatan sasaran anggaran

		Correlations												
		KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	KS7	KS8	KS9	KS10	KS11	KS12	KETEPATAN
KS1	Pearson Correlation	1	,290	,174	,312	,289	,128	,329	,191	,410**	,492**	-,116	,304	,438**
	Sig. (2-tailed)		,092	,319	,068	,093	,464	,053	,272	,015	,003	,506	,076	,008
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS2	Pearson Correlation	,290	1	,432**	,559**	,122	,123	,203	,211	,089	,108	-,288	,131	,469**
	Sig. (2-tailed)	,092		,009	,000	,486	,483	,241	,225	,609	,536	,093	,452	,004
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS3	Pearson Correlation	,174	,432**	1	,676**	-,067	-,075	,297	,241	,198	,098	,167	,248	,505**
	Sig. (2-tailed)	,319	,009		,000	,702	,667	,083	,162	,254	,576	,338	,150	,002
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS4	Pearson Correlation	,312	,559**	,676**	1	,233	-,046	,417*	,298	,095	,301	,238	,394*	,627**
	Sig. (2-tailed)	,068	,000	,000		,178	,793	,013	,083	,587	,079	,168	,019	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS5	Pearson Correlation	,289	,122	-,067	,233	1	,420*	,536**	,541**	,427*	,462**	,235	,349*	,612**
	Sig. (2-tailed)	,093	,486	,702	,178		,012	,001	,001	,011	,005	,174	,040	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS6	Pearson Correlation	,128	,123	-,075	-,046	,420*	1	,264	,478**	,349*	,148	,217	,276	,431**
	Sig. (2-tailed)	,464	,483	,667	,793	,012		,125	,004	,040	,397	,211	,108	,010
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS7	Pearson Correlation	,329	,203	,297	,417*	,536**	,264	1	,642**	,559**	,675**	,290	,534**	,792**
	Sig. (2-tailed)	,053	,241	,083	,013	,001	,125		,000	,000	,000	,091	,001	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS8	Pearson Correlation	,191	,211	,241	,298	,541**	,478**	,642**	1	,559**	,577**	,397*	,546**	,786**
	Sig. (2-tailed)	,272	,225	,162	,083	,001	,004	,000		,000	,000	,018	,001	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS9	Pearson Correlation	,410*	,089	,198	,095	,427*	,349*	,559**	,559**	1	,578**	,422*	,475**	,686**
	Sig. (2-tailed)	,015	,609	,254	,587	,011	,040	,000	,000		,000	,012	,004	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS10	Pearson Correlation	,492**	,108	,098	,301	,462**	,148	,675**	,577**	,578**	1	,286	,692**	,711**

	Sig. (2-tailed)	,003	,536	,576	,079	,005	,397	,000	,000	,000		,096	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS11	Pearson Correlation	-,116	-,288	,167	,238	,235	,217	,290	,397*	,422*	,286	1	,260	,411*
	Sig. (2-tailed)	,506	,093	,338	,168	,174	,211	,091	,018	,012	,096		,131	,014
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KS12	Pearson Correlation	,304	,131	,248	,394*	,349*	,276	,534**	,546**	,475**	,692**	,260	1	,693**
	Sig. (2-tailed)	,076	,452	,150	,019	,040	,108	,001	,001	,004	,000	,131		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KETEPA TAN	Pearson Correlation	,438**	,469**	,505**	,627**	,612**	,431**	,792**	,786**	,686**	,711**	,411*	,693**	1
	Sig. (2-tailed)	,008	,004	,002	,000	,000	,010	,000	,000	,000	,000	,014	,000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



3. Sistem pelaporan

Correlations		SP1	SP2	SP3	Sistem Pelaporan
SP1	Pearson Correlation	1	,715**	,650**	,900**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	35	35	35	35
SP2	Pearson Correlation	,715**	1	,701**	,895**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	35	35	35	35
SP3	Pearson Correlation	,650**	,701**	1	,874**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	35	35	35	35
SISTEM PELAPORAN	Pearson Correlation	,900**	,895**	,874**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	35	35	35	35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Akuntabilitas kinerja keuangan

Correlations		AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	akuntblits
AK1	Pearson Correlation	1	,347*	,505**	,264	,244	,116	,632**
	Sig. (2-tailed)		,041	,002	,125	,158	,506	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
AK2	Pearson Correlation	,347*	1	,345*	,476**	,349*	,457**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,041		,043	,004	,040	,006	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
AK3	Pearson Correlation	,505**	,345*	1	,255	,426*	,214	,685**
	Sig. (2-tailed)	,002	,043		,139	,011	,217	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
AK4	Pearson Correlation	,264	,476**	,255	1	,214	,164	,611**
	Sig. (2-tailed)	,125	,004	,139		,217	,347	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
AK5	Pearson Correlation	,244	,349*	,426*	,214	1	,406*	,668**
	Sig. (2-tailed)	,158	,040	,011	,217		,015	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
AK6	Pearson Correlation	,116	,457**	,214	,164	,406*	1	,598**
	Sig. (2-tailed)	,506	,006	,217	,347	,015		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
AKUNTABILITAS	Pearson Correlation	,632**	,750**	,685**	,611**	,668**	,598**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	35	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Sistem Pengendalian Internal

Correlations		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	Peng. Intern
SPI1	Pearson Correlation	1	,077	,326	,211	,139	,580**	,537**
	Sig. (2-tailed)		,658	,056	,224	,427	,000	,001
	N	35	35	35	35	35	35	35
SPI2	Pearson Correlation	,077	1	,356**	,490**	,632**	,161	,653**
	Sig. (2-tailed)	,658		,036	,003	,000	,354	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
SPI3	Pearson Correlation	,326	,356**	1	,333	,334*	,588**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,056	,036		,050	,050	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
SPI4	Pearson Correlation	,211	,490**	,333	1	,412*	,313	,693**
	Sig. (2-tailed)	,224	,003	,050		,014	,067	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
SPI5	Pearson Correlation	,139	,632**	,334**	,412**	1	,239	,709**
	Sig. (2-tailed)	,427	,000	,050	,014		,167	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
SPI6	Pearson Correlation	,580**	,161	,588**	,313	,239	1	,712**
	Sig. (2-tailed)	,000	,354	,000	,067	,167		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35
PENGENDI NTERN	Pearson Correlation	,537**	,653**	,731**	,693**	,709**	,712**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	35	35	35	35	35	35	35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

C. Uji reliabilitas data

1. Intergovernmental Revenue

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,838	3

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IR1	5,8286	2,382	,788	,692
IR2	5,7714	2,652	,645	,828
IR3	5,9429	2,350	,679	,801

2. Ketepatan Sasaran Anggaran

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,844	12

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KS1	41,2000	40,400	,430	,838
KS2	41,9429	40,997	,303	,849
KS3	42,1143	41,281	,365	,842
KS4	42,0857	37,728	,521	,832
KS5	41,8000	38,635	,528	,831
KS6	41,6571	41,997	,323	,845
KS7	41,2000	36,400	,732	,815
KS8	41,0000	37,471	,710	,818
KS9	41,2000	37,929	,615	,825
KS10	41,1143	36,516	,669	,820
KS11	41,4000	42,482	,301	,846
KS12	41,4286	38,899	,642	,824

3. Sistem Pelaporan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,864	3

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	8,7429	2,314	,739	,824
SP2	8,2857	2,798	,780	,782
SP3	8,2286	2,770	,726	,823

4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,733	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AK1	19,8000	6,282	,427	,709
AK2	19,5429	5,961	,609	,656
AK3	19,6571	6,291	,526	,681
AK4	20,5429	6,373	,397	,718
AK5	19,4286	6,193	,484	,691
AK6	19,6000	6,482	,390	,718

5. Sistem Pengendalian Internal

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,753	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPI1	18,3714	8,652	,385	,744
SPI2	18,0857	8,316	,534	,717
SPI3	17,9143	7,139	,570	,696
SPI4	17,9429	7,232	,505	,715
SPI5	17,8286	6,793	,491	,725
SPI6	17,8571	7,185	,537	,705

LAMPIRAN 3
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

INTERGOVERNMENTAL REVENUE					SISTEM PELAPORAN			
NO	IR1	IR2	IR3	TOTAL	SP1	SP2	SP3	TOTAL
1	4	4	4	12	5	5	5	15
2	4	4	3	11	5	4	5	14
3	5	4	2	11	4	5	4	13
4	4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	4	14	4	5	5	14
6	4	4	4	12	4	4	4	12
7	4	4	4	12	4	4	4	12
8	5	5	4	14	5	5	5	15
9	5	5	4	14	5	5	5	15
10	3	3	3	9	5	5	5	15
11	4	4	4	12	5	5	5	15
12	4	4	4	12	5	5	5	15
13	4	4	4	12	4	4	4	12
14	4	4	4	12	5	5	5	15
15	4	4	4	12	5	5	5	15
16	4	4	4	12	5	5	5	15
17	4	4	4	12	4	4	4	12
18	4	3	4	11	5	5	5	15
19	4	4	4	12	5	5	5	15
20	4	4	4	12	5	5	5	15
21	5	5	5	15	5	5	5	15
22	4	4	3	11	4	4	4	12
23	3	3	3	9	4	4	5	13
24	3	3	4	10	3	4	4	11
25	4	4	4	12	4	4	4	12
26	4	4	4	12	4	4	4	12
27	4	4	4	12	4	4	4	12
28	3	3	3	9	4	5	5	14
29	4	4	4	12	4	4	5	13
30	5	5	5	15	5	5	5	15
31	3	4	5	12	4	4	4	12
32	4	4	4	12	4	4	4	12
33	4	4	4	12	4	4	4	12
34	3	4	3	10	5	4	5	14
35	4	4	4	12	5	5	5	15
36	4	4	4	12	5	5	5	15
37	3	3	3	9	3	5	5	13

38	4	4	4	12	4	3	4	11
39	3	3	4	10	5	5	5	15
40	5	5	5	15	5	5	4	14
41	4	4	4	12	3	4	4	11
42	4	4	3	11	4	4	4	12
43	1	3	3	7	3	3	3	9
44	3	3	3	9	3	5	5	13
45	4	4	4	12	4	5	5	14
46	4	4	4	12	4	4	4	12
47	4	4	4	12	5	5	5	15
48	5	5	5	15	5	5	5	15
49	4	4	4	12	5	4	5	14
50	5	5	5	15	5	5	5	15
51	5	5	4	14	5	5	5	15
52	5	4	4	13	5	4	5	14
53	4	5	4	13	4	4	4	12
54	4	4	4	12	5	5	5	15
55	4	3	4	11	5	5	5	15
56	4	4	3	11	4	5	5	14
57	4	4	3	11	4	5	5	14
58	5	5	4	14	4	4	4	12
59	5	5	4	14	4	4	4	12
60	4	4	4	12	4	4	5	13
61	5	4	4	13	4	4	4	12
62	4	5	4	13	5	5	4	14
63	4	4	4	12	5	5	5	15
64	4	4	4	12	5	5	5	15
65	4	4	4	12	4	4	4	12
66	4	4	4	12	5	3	4	12
67	4	4	5	13	4	4	5	13
68	3	3	4	10	5	5	5	15
69	4	4	4	12	5	5	5	15
70	5	5	5	15	5	5	5	15
71	4	4	4	12	4	5	5	14
72	4	5	4	13	5	5	5	15
73	5	4	4	13	4	5	5	14
74	5	4	4	13	4	5	5	14
75	4	5	4	13	5	5	5	15

KETEPATAN SASARAN ANGGARAN

NO	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	KS7	KS8	KS9	KS10	KS11	KS12	TOTAL
1	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	54
2	5	4	4	4	4	3	5	3	4	5	4	3	48
3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	52
4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	52
5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	56
6	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	51
7	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	3	4	50
8	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	57
9	5	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	5	54
10	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	54
11	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	48
12	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	50
13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	51
14	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	48
15	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	48
16	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	48
17	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	53
18	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	43
19	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	47
20	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	47
21	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	52
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
23	3	3	3	4	2	2	5	4	5	4	4	5	44
24	4	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	5	50
25	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
26	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
27	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
28	3	3	3	3	3	3	5	4	5	5	5	5	47
29	4	4	3	4	4	3	5	4	4	5	4	4	48
30	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	54
31	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	44
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
34	4	3	3	3	3	4	4	5	4	4	5	5	47
35	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	5	4	49
36	4	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	49
37	4	4	3	3	3	4	4	5	3	5	4	4	46
38	3	4	3	4	4	4	5	5	4	4	5	5	50

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN								SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL						
NO	AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	TOTAL	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	TOTAL
1	4	5	5	4	5	5	28	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	3	4	5	24	3	4	5	4	5	4	25
3	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	4	4	23
4	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	4	4	5	5	27	3	5	4	4	4	5	25
6	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	3	4	4	23
7	3	3	4	4	4	4	22	3	3	3	3	4	4	20
8	4	5	3	4	4	4	24	3	4	4	4	4	4	23
9	4	3	4	4	4	4	23	3	4	4	4	4	4	23
10	4	4	5	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	24
11	5	4	4	4	4	4	25	3	5	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
13	5	4	4	4	5	4	26	4	3	3	3	4	4	21
14	4	5	4	4	4	4	25	3	3	3	3	4	5	21
15	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	3	4	5	21
16	4	5	4	4	4	4	25	3	3	3	3	4	5	21
17	5	4	4	4	4	4	25	3	3	3	3	4	5	21
18	4	4	3	4	5	4	24	3	4	3	4	4	4	22
19	4	4	4	3	5	4	24	3	3	4	4	4	4	22
20	4	4	4	3	5	4	24	3	4	4	4	4	4	23
21	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	3	4	4	21
22	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	4	4	23
23	4	4	4	4	4	5	25	3	3	4	3	3	3	19
24	3	5	4	4	5	3	24	4	4	3	4	4	4	23
25	4	4	3	3	4	4	22	3	3	4	4	4	4	22
26	4	4	4	5	4	3	24	3	3	4	4	4	4	22
27	4	4	4	3	4	3	22	3	3	4	4	4	4	22
28	3	5	4	4	5	5	26	3	3	3	3	3	3	18
29	4	2	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24
30	4	5	5	4	4	4	26	4	4	4	4	4	5	25
31	4	4	3	3	4	3	21	3	3	3	3	3	3	18
32	4	4	4	4	4	4	24	1	3	3	3	3	3	16
33	4	4	4	4	4	4	24	1	3	3	3	3	3	16
34	5	4	4	5	4	5	27	4	4	5	5	4	5	27
35	4	3	4	4	5	5	25	4	3	3	4	4	4	22
36	3	4	4	4	5	5	25	4	4	5	4	3	3	23
37	3	4	4	3	4	4	22	4	3	4	4	3	4	22
38	3	3	4	4	5	4	23	3	3	4	3	4	4	21
39	3	5	4	3	4	4	23	4	3	4	4	3	3	21
40	5	4	4	4	5	5	27	4	4	5	5	5	5	28

41	4	4	4	4	3	4	23	4	3	4	4	4	3	22
42	5	4	3	4	4	4	24	4	4	4	3	3	3	21
43	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
44	3	4	4	3	4	4	22	4	3	4	4	3	4	22
45	4	5	5	4	5	5	28	3	3	4	4	3	3	20
46	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	5	5	26	3	3	3	3	3	3	18
48	4	4	4	3	5	4	24	3	3	2	3	2	3	16
49	4	5	5	4	4	5	27	4	5	5	4	5	5	28
50	3	3	4	3	5	5	23	4	4	3	4	4	3	22
51	4	4	3	4	4	4	23	4	5	5	4	4	4	26
52	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	4	5	4	23
53	4	4	3	4	4	4	23	4	4	5	4	4	4	25
54	4	4	4	4	5	5	26	3	4	4	4	3	3	21
55	4	4	4	4	5	5	26	3	4	4	4	3	3	21
56	4	5	4	3	3	4	23	3	4	4	3	4	3	21
57	4	5	4	3	3	4	23	3	4	4	3	4	3	21
58	4	4	4	4	5	4	25	4	3	3	4	4	4	22
59	4	4	4	4	5	4	25	4	3	3	4	4	4	22
60	5	5	4	3	4	4	25	3	5	4	3	5	5	25
61	4	4	5	5	5	5	28	4	4	4	4	4	4	24
62	5	4	4	4	5	5	27	5	5	5	5	5	5	30
63	5	4	4	4	4	5	26	4	4	4	5	4	4	25
64	5	4	4	4	5	5	27	4	3	3	4	4	3	21
65	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
66	4	3	4	2	4	3	20	2	3	3	3	3	3	17
67	4	4	4	4	4	5	25	2	3	4	4	5	5	23
68	4	5	4	5	5	5	28	3	3	2	3	3	3	17
69	3	3	4	4	5	5	24	3	3	3	4	4	3	20
70	4	4	4	3	5	5	25	3	3	3	4	4	4	21
71	3	3	3	3	4	4	20	3	3	4	4	4	4	22
72	4	4	5	5	5	5	28	4	3	4	4	5	3	23
73	4	4	4	4	4	5	25	4	5	4	4	4	5	26
74	4	4	4	4	4	5	25	4	5	4	4	4	5	26
75	4	4	5	5	5	5	28	4	3	4	4	5	3	23

LMPIRAN 4
STATISTIK DESKRIPTIF

A. Statistik Deskriptif Responden

Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	20	26 %
2	Perempuan	55	74 %
Jumlah		75	100 %

Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30 Tahun	12	16%
2	31-40 Tahun	25	34%
3	41-50 Tahun	31	42%
4	>50 tahun	6	8 %
Jumlah		75	100 %

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D3	10	14 %
2	S1	59	78 %
3	S2	6	8 %
4	S3	0	0 %
Jumlah		75	100 %

Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	0-5 Tahun	36	48 %
2	6-10 Tahun	20	26,6 %
3	>10 Tahun	19	25,4 %
Jumlah		75	100 %

B. Stati stik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Intergovernmental Revenue</i>	75	7,00	15,00	12,0400	1,56343
Ketepatan Sasaran Anggaran	75	36,00	58,00	49,8933	4,20287
Sistem Pelaporan	75	9,00	15,00	13,5867	1,45280
Sistem Pengendalian Internal	75	16,00	30,00	22,2267	2,76353
Akuntabilitas Kinerja Keuangan	75	18,00	28,00	24,4267	1,98081
Valid N (listwise)	75				

C. Statistik Deskriptif Pernyataan

1. Intergovernmental Revenue

Statistics

		IR1	IR2	IR3
N	Valid	75	75	75
	Missing	0	0	0
Mean		4,0533	4,0667	3,9200
Minimum		1,00	3,00	2,00
Maximum		5,00	5,00	5,00
Sum		304,00	305,00	294,00

IR1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	1,3	1,3	1,3
	3,00	10	13,3	13,3	14,7
	4,00	47	62,7	62,7	77,3
	5,00	17	22,7	22,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

IR2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	11	14,7	14,7	14,7
	4,00	48	64,0	64,0	78,7
	5,00	16	21,3	21,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

IR3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,3	1,3	1,3
	3,00	12	16,0	16,0	17,3
	4,00	54	72,0	72,0	89,3
	5,00	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

2. Ketepatan Sasaran Anggaran

Statistics

		KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6	KS7	KS8	KS9	KS10	KS11	KS12
N	Valid	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,1600	4,0933	3,7067	3,8533	4,0933	4,0000	4,4667	4,3733	4,3200	4,2667	4,1867	4,3733
Minimum		3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Maximum		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum		312,00	307,00	278,00	289,00	307,00	300,00	335,00	328,00	324,00	320,00	314,00	328,00

KS1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	8	10,7	10,7	10,7
	4,00	47	62,7	62,7	73,3
	5,00	20	26,7	26,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	10	13,3	13,3	13,3
	4,00	48	64,0	64,0	77,3
	5,00	17	22,7	22,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	27	36,0	36,0	36,0
	4,00	43	57,3	57,3	93,3
	5,00	5	6,7	6,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	22	29,3	29,3	29,3
	4,00	42	56,0	56,0	85,3
	5,00	11	14,7	14,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,3	1,3	1,3
	3,00	8	10,7	10,7	12,0
	4,00	49	65,3	65,3	77,3
	5,00	17	22,7	22,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,3	1,3	1,3
	3,00	9	12,0	12,0	13,3
	4,00	54	72,0	72,0	85,3
	5,00	11	14,7	14,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	4	5,3	5,3	5,3
	4,00	32	42,7	42,7	48,0
	5,00	39	52,0	52,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	3	4,0	4,0	4,0
	4,00	41	54,7	54,7	58,7
	5,00	31	41,3	41,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	5	6,7	6,7	6,7
	4,00	41	54,7	54,7	61,3
	5,00	29	38,7	38,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	12	16,0	16,0	16,0
	4,00	31	41,3	41,3	57,3
	5,00	32	42,7	42,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	6	8,0	8,0	8,0
	4,00	49	65,3	65,3	73,3
	5,00	20	26,7	26,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

KS12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	4	5,3	5,3	5,3
	4,00	39	52,0	52,0	57,3
	5,00	32	42,7	42,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

3. Sistem Pelaporan**Statistics**

		SP1	SP2	SP3
N	Valid	75	75	75
	Missing	0	0	0
Mean		4,4267	4,5333	4,6267
Minimum		3,00	3,00	3,00
Maximum		5,00	5,00	5,00
Sum		332,00	340,00	347,00

SP1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	5	6,7	6,7	6,7
	4,00	33	44,0	44,0	50,7
	5,00	37	49,3	49,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SP2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	3	4,0	4,0	4,0
	4,00	29	38,7	38,7	42,7
	5,00	43	57,3	57,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SP3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	1	1,3	1,3	1,3
	4,00	26	34,7	34,7	36,0
	5,00	48	64,0	64,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan**Statistics**

		AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6
N	Valid	75	75	75	75	75	75
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3,9867	4,0400	3,9867	3,8133	4,3200	4,2800
Minimum		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00
Maximum		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum		299,00	303,00	299,00	286,00	324,00	321,00

AK1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	12	16,0	16,0	16,0
	4,00	52	69,3	69,3	85,3
	5,00	11	14,7	14,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

AK2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,3	1,3	1,3
	3,00	9	12,0	12,0	13,3
	4,00	51	68,0	68,0	81,3
	5,00	14	18,7	18,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

AK3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	9	12,0	12,0	12,0
	4,00	58	77,3	77,3	89,3
	5,00	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

AK4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,3	1,3	1,3
	3,00	18	24,0	24,0	25,3
	4,00	50	66,7	66,7	92,0
	5,00	6	8,0	8,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

AK5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	4	5,3	5,3	5,3
	4,00	43	57,3	57,3	62,7
	5,00	28	37,3	37,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

AK6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	6	8,0	8,0	8,0
	4,00	42	56,0	56,0	64,0
	5,00	27	36,0	36,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

5. Sistem Pengendalian Intern**Statistics**

		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6
N	Valid	75	75	75	75	75	75
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3,3867	3,6000	3,7600	3,7467	3,8667	3,8667
Minimum		1,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00
Maximum		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sum		254,00	270,00	282,00	281,00	290,00	290,00

SPI1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	2	2,7	2,7	2,7
	2,00	2	2,7	2,7	5,3

	3,00	37	49,3	49,3	54,7
	4,00	33	44,0	44,0	98,7
	5,00	1	1,3	1,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SPI2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	38	50,7	50,7	50,7
	4,00	29	38,7	38,7	89,3
	5,00	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SPI3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	2	2,7	2,7	2,7
	3,00	22	29,3	29,3	32,0
	4,00	43	57,3	57,3	89,3
	5,00	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SPI4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	23	30,7	30,7	30,7
	4,00	48	64,0	64,0	94,7
	5,00	4	5,3	5,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SPI5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,3	1,3	1,3
	3,00	17	22,7	22,7	24,0
	4,00	48	64,0	64,0	88,0
	5,00	9	12,0	12,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SPI6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	24	32,0	32,0	32,0
	4,00	37	49,3	49,3	81,3
	5,00	14	18,7	18,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

LAMPIRAN 5

UJI KUALITAS DATA

A. Uji Validitas Data

1. *Intergovernmental Revenue*

Correlations					
		IR1	IR2	IR3	Intergovernmental
IR1	Pearson Correlation	1	,736**	,425**	,880**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75
IR2	Pearson Correlation	,736**	1	,495**	,890**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75
IR3	Pearson Correlation	,425**	,495**	1	,740**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75
Intergovernmental	Pearson Correlation	,880**	,890**	,740**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)					

[illegible]

KS9	Pearson Correlation	.121	.181	,387**	,470**	,321**	.080	,332**	,363*	1	,426**	,303**	,387**	,634**
	Sig. (2-tailed)	.303	.121	.001	.000	.005	.497	.004	.001		.000	.008	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
KS10	Pearson Correlation	.151	.192	,250*	.027	,246*	.131	,332**	,316*	,426*	1	,375**	,272*	,552**
	Sig. (2-tailed)	.195	.099	.030	.820	.034	.261	.004	.006	.000		.001	.018	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
KS11	Pearson Correlation	.071	.068	,250*	.187	,260*	,338**	.179	.161	,303*	,375**	1	,604**	,540**
	Sig. (2-tailed)	.543	.561	.031	.109	.024	.003	.125	.168	.008	.001		.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
KS12	Pearson Correlation	.098	.169	.204	.180	,237*	,323**	.151	,389*	,387*	,272*	,604**	1	,569**
	Sig. (2-tailed)	.405	.147	.079	.122	.040	.005	.197	.001	.001	.018	.000		.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Ketanangan	Pearson Correlation	,538*	,640**	,638**	,552**	,684**	,576**	,465**	,570*	,634*	,552**	,540**	,569**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).														
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).														

3. Sistem pelaporan

Correlations					
		SP1	SP2	SP3	Sistem Pelaporan
SP1	Pearson Correlation	1	,489**	,550**	,815**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75
SP2	Pearson Correlation	,489**	1	,726**	,862**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75
SP3	Pearson Correlation	,550**	,726**	1	,876**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75
SistemPelaporan	Pearson Correlation	,815**	,862**	,876**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Akuntabilitas kinerja keuangan

Correlations								
		AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	Akuntblits
A K1	PearsonCorrelation	1	,163	,050	,241*	,014	,171	,470**
	Sig. (2-tailed)		,164	,671	,038	,908	,141	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
A K2	PearsonCorrelation	,163	1	,236*	,098	-,038	,080	,450**
	Sig. (2-tailed)	,164		,042	,403	,749	,495	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
A K3	PearsonCorrelation	,050	,236*	1	,328**	,262*	,386**	,618**
	Sig. (2-tailed)	,671	,042		,004	,023	,001	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
A K4	PearsonCorrelation	,241	,098	,328**	1	,261*	,378**	,664**
	Sig. (2-tailed)	,038	,403	,004		,024	,001	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
A K5	PearsonCorrelation	,014	-,038	,262*	,261*	1	,478**	,568**
	Sig. (2-tailed)	,908	,749	,023	,024		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
A K6	PearsonCorrelation	,171	,080	,386**	,378**	,478**	1	,722**
	Sig. (2-tailed)	,141	,495	,001	,001	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Ak unt abi	PearsonCorrelation	,470**	,450**	,618**	,664**	,568**	,722**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	

litas	N	75	75	75	75	75	75	75
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

5. Sistem Pengendalian Internal

Correlations								
		SPI1	SPI2	SP3	SPI4	SPI5	SPI6	Pengnd . Intern
SPI 1	PearsonCorrelation	1	,361**	,373**	,509**	,277*	,217	,650**
	Sig. (2-tailed)		,001	,001	,000	,016	,061	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
SPI 2	PearsonCorrelation	,361**	1	,556**	,379**	,320**	,397**	,720**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,001	,005	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
SPI 3	PearsonCorrelation	,373**	,556**	1	,565**	,438**	,302**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000	,009	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
SPI 4	PearsonCorrelation	,509**	,379**	,565**	1	,415**	,297**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,010	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
SPI 5	PearsonCorrelation	,277*	,320**	,438**	,415**	1	,576**	,709**
	Sig. (2-tailed)	,016	,005	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
SPI 6	PearsonCorrelation	,217	,397**	,302**	,297**	,576**	1	,669**
	Sig. (2-tailed)	,061	,000	,009	,010	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Pen gnd. Inter	PearsonCorrelation	,650**	,720**	,762**	,726**	,709**	,669**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75	75
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

B. Uji Reliabilitas

1. Inergovergovermental revenue

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.787	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IR1	7.9867	1.013	.677	.661
IR2	7.9733	1.134	.743	.587
IR3	8.1200	1.458	.491	.843

2. Ketepatan Sasaran Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KS1	45.7333	15.333	.426	.809
KS2	45.8000	14.811	.544	.799
KS3	46.1867	14.857	.544	.800
KS4	46.0400	15.066	.430	.809
KS5	45.8000	14.486	.593	.795
KS6	45.8933	15.232	.474	.805
KS7	45.4267	15.680	.341	.816
KS8	45.5200	15.280	.468	.806
KS9	45.5733	14.843	.537	.800
KS10	45.6267	14.832	.415	.812
KS11	45.7067	15.426	.435	.809
KS12	45.5200	15.199	.463	.806

3. Sistem Pelaporan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.803	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	9.1600	1.028	.557	.838
SP2	9.0533	.997	.677	.702
SP3	8.9600	1.066	.735	.656

4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.606	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AK1	20.4400	3.196	.209	.612
AK2	20.3867	3.213	.161	.636
AK3	20.4400	2.979	.432	.532
AK4	20.6133	2.727	.441	.517
AK5	20.1067	2.961	.321	.569
AK6	20.1467	2.559	.515	.481

5. Sistem Pengendalian Internal

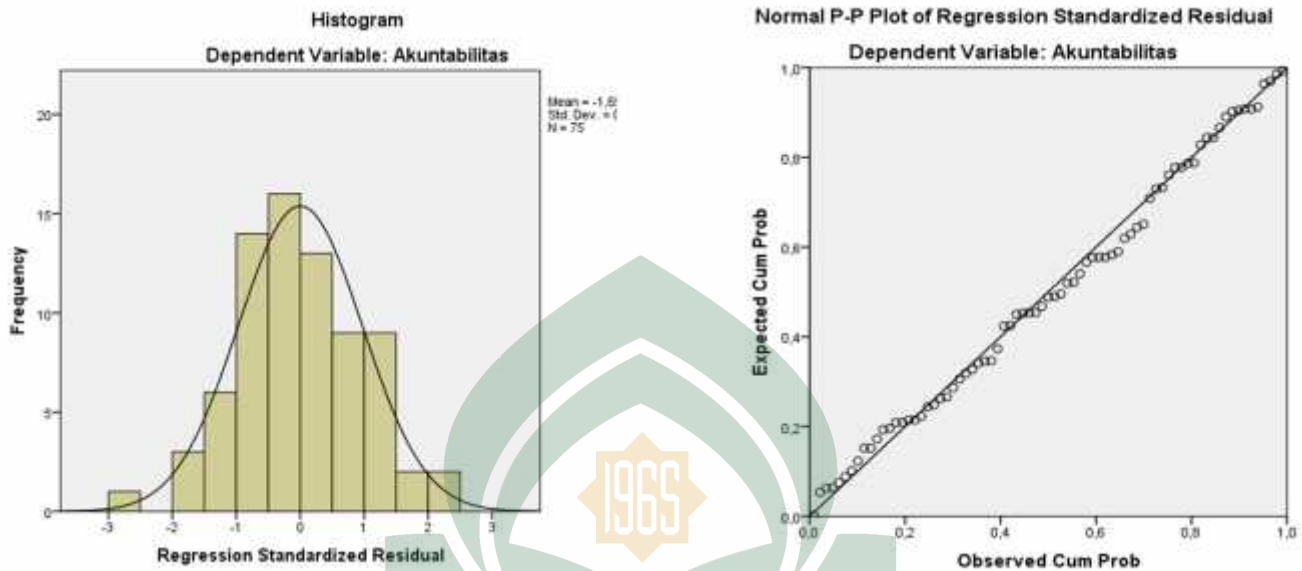
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.794	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPI1	18.8400	5.623	.464	.784
SPI2	18.6267	5.399	.565	.759
SPI3	18.4667	5.252	.624	.744
SPI4	18.4800	5.739	.609	.753
SPI5	18.3600	5.585	.566	.759
SPI6	18.3600	5.531	.487	.779

LAMPIRAN 6

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas



NPar Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.64982662
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.040
Kolmogorov-Smirnov Z		.533
Asymp. Sig. (2-tailed)		.939
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,075	1,617		1,902	,061
	<i>Intergovernmental revenue</i>	,023	,087	,036	,268	,789
	Ketepatan Anggaran	-,019	,034	-,078	-,552	,583
	Sistem Pelaporan	,050	,089	,072	,563	,575
	Sistem Pengendalian Intern	-,081	,045	-,221	-1,806	,075

a. Dependent Variable: AbsUt

LAMPIRAN 7

UJI HIPOTESIS

1. Analisis Regresi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.248	1.71803
a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Intergovernmental Renenue, Ketepatan Sasaran Anggaran				

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.782	3	26.927	9.123	.000 ^b
	Residual	209.565	71	2.952		
	Total	290.347	74			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), SistemPelaporan, Intergovernmental, KetepatanAnggaran						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.273	2.603		4.331	.000
	Intergovernmental	.004	.147	.003	.025	.980
	Ketepatan Anggaran	.139	.057	.296	2.439	.017
	SistemPelaporan	.453	.151	.332	2.998	.004
a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja Keuangan						

2. Analisis Regresi Nilai Selisih Mutlak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.379	.314	1.64103
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(Intergovernmental), X1_M, Zscore(SistemPelaporan), Zscore(PengendalianInternal), Zscore(KetepatanAnggaran), X2_M				

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109.917	7	15.702	5.831	.000 ^b
	Residual	180.429	67	2.693		
	Total	290.347	74			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore(Intergovernmental revenue), X1_M, Zscore(Sistem Pelaporan), Zscore(Pengendalian Internal), Zscore(Ketepatan Anggaran), X2_M						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.727	.414		57.244	.000
	Zscore (<i>Intergovernmental revenue</i>)	-.065	.226	-.032	-.286	.776
	Zscore (Ketepatan Anggaran)	.520	.237	.259	2.197	.031
	Zscore (Sistem Pelaporan)	.685	.212	.350	3.231	.002
	Zscore (Pengendalian Internal)	.411	.215	.201	1.911	.060
	X1_M	-.232	.274	-.094	-.847	.400
	X2_M	-.073	.337	-.028	-.216	.830
	X3_M	.901	.361	.288	2.495	.015
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Keuangan						

RIWAYAT HIDUP PENELITI



JASMIATI, dilahirkan pada tanggal 13 Desember 1994 di Kabuptan Enrekang. Penulis merupakan anak ke-2 dari 6 bersaudara. Buah hati dari pasangan Ayahanda Jaya dan Ibunda Masna. Penulis berdomisili di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Balla pada tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar kanak (SD) 94 Balla pada tahun 2001 hingga tahun 2007. Lalu, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Baraka tahun 2007 hingga 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baraka yang sekarang diganti menjadi SMA 5 Model Enrekang hingga tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi melalui jalur SMPTN. Selain mengikuti proses perkuliahan, penulis juga pernah bergabung dalam berbagai organisasi yaitu : Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Komisariat UIN Alauddin Makassar, UKM Olahraga Cabang Volley.

Contact Person:

Email : Jasmiati.miati94@gmail.com

No. Hp: 0852-4242-9948